



HASIL PENELITIAN

Kajian Penanganan Permasalahan
Kawasan Kumuh pada Pemukiman
dan Perumahan di Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2024

Kerjasama Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah (Bapeklitbangda) Kab.
Luwu Timur dengan Yayasan Lentera Inspirasi
Indonesia (LEINSA)

TIM PENYUSUN

No	Klasifikasi	Nama
1	Ketua Tim	Nafsiah Aswawi, S.T., M.Ars
2	Tenaga ahli	1. Dr. Munawir, S.E., M.M. 2. Dr. Haedar Djidar, S.H., M.H. 3. Erwina, S.E., M.Si
3	Tenaga ahli teknis	1. Andi Tenri, S.T., M.T. 2. Asdar, S.T. 3. Muh. Rifqy Ramadhan, S.H., M.H.
4	Tenaga surveyor	1. M. Safwan Bahmar 2. M. Arif Syahdan 3. Febri 4. Cindy 5. Sucifa
5	Tenaga Administrasi	1. Nunung Misran, S.AN 2. Andi Meegi Senna, S.Sos., M.Si 3. Yuda Perdana, S.M. 4. Juliana, SP

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Pemukiman Kumuh	7
B. Karakteristik dan Kriteria Pemukiman Kumuh	7
C. Pemukiman Kumuh Pada Asepek Sosial Ekonomi	9
D. Penelitian Terdahulu	10
BAB III METODE PENELITIAN	12
A. Lokasi Penelitian	12
B. Jenis Penelitian	12
C. Tahap Penelitian	12
D. Sumber Data	13
E. Metode Pengumpulan Data	13
F. Teknik Pengambilan Sampel	16
G. Metode Analisis Data	17
BAB V HASIL PENELITIAN	19
A. Identitas Responden	19

B. Indikator Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kumuh	29
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Terjadinya Permasalahan Pemukiman dan Perumahan Kumuh Di Kabupaten Luwu Timur	35
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Terjadinya Permasalahan Pemukiman dan Perumahan Kumuh Berdasarkan Sebaran Kecamatan Di Kabupaten Luwu Timur	38
E. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Pendukung Penanganan Permasalahan Pemukiman dan Perumahan Kumuh Di Kabupaten Luwu Timur	47
F. Rekomendasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman dan Perumahan Kumuh Di Kabupaten Luwu Timur	51
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1 : Data sebaran perumahan kumuh	3
2 : Jumlah Sebaran Sampel berdasarkan Kecamatan	17
3 : Deskripsi Dimensi Kondisi Fisik	30
4 : Deskripsi Dimensi Sosial dan Ekonomi	31
5 : Deskripsi Dimensi Lingkungan.....	33
6 Deskripsi Dimensi Keamanan	34
7. Deskripsi Dimensi Legalitas.....	34

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1 : Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	19
2 : Responden Berdasarkan Usia.....	20
3 : Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Kab Luwu Timur	22
4: Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	23
5 : Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan.....	25
6 : Respondan Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga Dalam Rumah.....	26
7: Respondan Berdasarkan Jumlah Tanggungan.....	28
8 : Dimensi Kondisi Fisik Berdasarkan Sebaran Kecmatan.....	38
9 : Dimensi Sosial Ekonomi Berdasarkan Sebaran Kecmatan.....	39
10 : Dimensi Kondisi Fisik Berdasarkan Sebaran Kecmatan.....	38
11 : Dimensi Sosial Ekonomi Berdasarkan Sebaran Kecmatan.....	39
12 : Dimensi Lingkungan Berdasarkan Sebaran Kecmatan.....	41
13 : Dimensi Keamanan Berdasarkan Sebaran Kecmatan.....	42
14 : Dimensi Legalitas Berdasarkan Sebaran Kecmatan.....	43
15 : Pemukiman dan perumahan kumuh berdasarkan reting skor kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.....	44
15 : Persepsi masyarakat terhadap program bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.....	47
16 : Persepsi masyarakat terhadap program Pemerintah dalam Penangan Maslaah Pemukiman dan Perumahan Kumuh.....	48
17 : Persepsi masyarakat terhadap program terhadap program bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kab. Luwu Timur.....	49
18 : Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Pemerintah Kab. Luwu Timur.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan permukiman di setiap wilayah maupun kota atau kabupaten disebabkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami dan karena proses urbanisasi yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh, sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian dasar di perkotaan yang menimbulkan permasalahan permukiman di perkotaan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan, populasi, pendidikan, sosial kekerabatan, kesehatan dan sanitasi, hunian yang tidak layak, perkonomian (UMR) rendah serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Dalam arti luas, perumahan dan permukiman tidak sekedar tempat tinggal saja, namun merupakan kombinasi kompleks dari berbagai unsur budaya. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap aktivitas biologis, ekonomi, sosial, politik, keagamaan, dan lain-lain. Proses perubahan rumah dan permukiman tidak hanya dilihat dari sudut pandang material atau cara hidup, namun juga sebagai proses terciptanya lingkungan permukiman yang lebih baik, sehat, sebagai tempat aktifitas serta eksistensi manusia dalam penciptaan ruang hidup lokal dan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain faktor diatas migrasi penduduk juga sangat mempengaruhi dampak permukiman. Hal ini terkait dengan kebutuhan tempat tinggal di pusat kota yang sudah padat berbanding lurus dengan populasi penduduk, akibatnya terjadi proses densifikasi bangunan yang tidak terkendali dan munculnya permukiman kumuh (Priyatno, 2016). Ada pula masyarakat yang membangun rumah sendiri dan menggunakan material seadanya di lahan tertentu yang tidak mempunyai status hukum, sehingga menyebabkan munculnya pemukiman liar. Hingga saat ini, permukiman kumuh dianggap sebagai fenomena kondisional dari 'ruang hidup saat ini', yang dimaknai sebagai korban pasif pembangunan dan oleh karena itu harus dihilangkan dari sistem spasial perumahan.

Ciri khas permukiman kumuh bukanlah pada tampilannya, melainkan hubungan antara permukiman kumuh dan penghuninya serta lingkungan dan penghuninya yang dianggap telah memenuhi standar layak huni minimum oleh pemerintah kota. Dengan definisi seperti ini, apa yang dimaksud dengan kawasan kumuh disetiap daerah akan berbeda-beda.

Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. secara eksplisit dicantumkan bahwa “Salah satu ruang lingkup penyelenggaraan PKP adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pesatnya perkembangan perekonomian di sektor pertambangan dan penggalian, pendidikan, pemerintahan dan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur, sehingga mempunyai dampak pada mata pencaharian masyarakat yang dulunya didominasi sektor pertanian berubah mengikuti perkembangan yang ada dan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar untuk masuk menetap ke wilayah kabupaten luwu Timur dengan di buktikan dari data BPS jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun 2020 dengan total jumlah penduduk 296.741 dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2024 jumlah penduduk sebesar 312.731 Jiwa.

Tindak lanjut pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dituangkan melalui Surat keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 169 / D-06 / IV / 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Penetapan Perumahan dan pemukiman kumuh di Luwu Timur menyebar ke seluruh kecamatan dengan jumlah 11 Kecamatan dan 26 kawasan di desa, dengan total luas keseluruhan 271,3 Ha, 7 kawasan dengan kategori ringan dan 19 kawasan dengan kategori sedang,

Kecamatan Wotu merupakan kawasan terluas 77,4 Ha dengan penyumbang kawasan terluas di Desa Lampenai dengan luas 39,9 Ha, diikuti Kecamatan Malili dengan luas 55,9 Ha dan di urutan ketiga kecamatan Burau dengan luas 36,2 Ha.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tim penulis mengangkat topik penelitian dengan judul **“KAJIAN PENANGANAN PERMASALAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KUMUH DI KABUPATEN LUWU TIMUR”**. Kabupaten Luwu Timur mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang tidak terkendali dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini dipicu oleh migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, serta pertumbuhan alami penduduk. Akibatnya, terjadi peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Sayangnya, infrastruktur dan perencanaan kota yang ada belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan ini. Hal ini mengakibatkan munculnya permukiman dan perumahan kumuh, yang ditandai dengan kondisi lingkungan yang buruk, kurangnya akses terhadap air bersih, sanitasi yang tidak memadai, dan infrastruktur yang rusak atau tidak ada.

Situasi ini tidak hanya memperburuk kualitas hidup warga tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kajian ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, mengevaluasi efektivitas program penanganan yang telah ada, dan mengembangkan strategi baru yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah permukiman kumuh dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian untuk kajian ini adalah menggunakan (*mixed methods*) dimana mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif.

Tabel 1. Data sebaran perumahan kumuh.

NO	KECAMATAN	NAMA KAWASAN	LUAS KAWASAN	TINGKAT KUMUH
1.	MALILI	Kawasan Balantang, Desa balantang	12,5 Ha	Sedang

NO	KECAMATAN	NAMA KAWASAN	LUAS KAWASAN	TINGKAT KUMUH
		Kawasan wewangriu, Desa Wewangriu	19,2 Ha	Sedang
		Kawasan baruqa, desa baruqa	15,3 Ha	Sedang
		Kawasan Lakawali Pantai, Desa Lakawali Pantai	8,9 Ha 55,9	Ringan
2.	Nuha	Kawasn Nikkel, Desa Nikkel	19,5 Ha	sedang
		Kawasan Sorowako, Desa Sorowako	6,5 Ha	Sedang
3.	Wasuponda	Kawasan Wasuponda, Desa Wasuponda	4,8 Ha	Ringan
4.	Tomoni	Kawasan Beringin Jaya, Desa beringin jaya	5,8 Ha	Sedang
		Kawasan kelurahan Tomoni, Kelurahan Tomoni	16 Ha	Sedang
5.	Wotu	Kawasan Bawalipu 1, Desa Bawalipu	13,6 Ha	Sedang
		Kawasan Bawalipu 2, Desa Bawalipu	11,6 Ha	Sedang
		Kawasan Bawalipu 3, Desa Bawalipu	3,4 Ha	Sedang
		Kawasan Bawalipu 4, Desa Bawalipu	5,4 Ha	Sedang
		Kawasan Lampenai, Desa Lampenai	39,9 Ha	Sedang
		Kawasan Balo-balo, Desa Balo-balo	3,5 Ha 77,4	Sedang
6.	Angkona	Kawasan Watangpanua, Desa Watangpanua	4,8 Ha	Sedang
		Kawasan Tampinna, Desa Tampinna	8,3 Ha	Sedang

NO	KECAMATAN	NAMA KAWASAN	LUAS KAWASAN	TINGKAT KUMUH
7.	Tomoni Timur	Kawasan Pattengko, Desa Pattengko	4,3 Ha	Ringan
		Kawasan Cendana Hitam, Desa Cendana Hitam	5,1 Ha	Ringan
8.	Towuti	Kawasan Pekaloa, Desa Pekaloa	8,9 Ha	Sedang
9.	Mangkutana	Kawasan Wonorejo, Desa Wonorejo	12 Ha	Sedang
10.	Kaleana	Kawasan Pertasi Kencana, Desa Pertasi Kencana	5,8 Ha	Ringan
11.	Burau	Kawasan Mabonta, Desa Mabonta	16,7 Ha	Ringan
		Kawasan Lumbewe, Desa Lumbewe	6,5 Ha	Sedang
		Kawasan Burau Pantai, Desa Burau Pantai	6,5 Ha	Sedang
		Kawasan Kalitiri, Desa Kalitiri	6,5 Ha 36,2	Ringan

Sumber: SK Bupati Luwu Timur Nomor 169 / D-06 / IV / 2021
Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di wilayah Kabupaten Luwu Timur

B. RUMUSAN MASALAH

1. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur?
2. Rekomendasi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di wilayah kabupaten Luwu Timur ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penyusunan Kajian Penanganan Permasalahan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh ini dapat ditinjau dari aspek

sosial ekonomi masyarakat pada tingkat kehidupan yang sehat merata dan adil adalah sebagai dokumen perencanaan strategi pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bertitik tolak pada sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sosial ekonomi budaya di Kabupaten Luwu Timur:

1. Identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur.
2. Sebagai kajian dan rekomendasi yang akan diterapkan sebagai peningkatan penanganan masalah perumahan dan pemukiman kumuh secara berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian tentang Kajian Penanganan Permasalahan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh memiliki berbagai manfaat yang dapat ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penelitian tersebut:

1. Aspek Sosial : *Pertama* meningkatkan kualitas hidup, dalam berbagai aspek seperti aspek Kesehatan, Pendidikan, dan keamanan di Kawasan permukiman dan perumahan kumuh. *Kedua* Integrasi sosial, Masyarakat akan lebih diberdayakan dan kohesi sosial diperkuat agar ikatan sosial dan solidaritas Masyarakat semakin erat. *Ketiga* peningkatan infrastruktur sosial yaitu dapat mengidentifikasi fasilitas publik dan layanan sosial yang lebih baik
2. Aspek Ekonomi : *Pertama* peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja untuk Masyarakat melalui kewirausahaan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan produktivitas. *Kedua* Investasi dan Pembangunan ekonomi, akan mendorong masuknya investasi, pengembangan infrastruktur, dan program bantuan ekonomi. *Ketiga* Efisiensi ekonomi, akan tercipta optimalisasi sumber daya dan penghematan biaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PEMUKIMAN KUMUH

Menurut Nur Fitri Khoirunnisa (2012: 2), “Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung dan dapat merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan masyarakat.”

Menurut Johan Silas (Nur Fitri Khoirunnisa, 2012: 2) “Pemukiman Kumuh dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan pemukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio pemukiman kumuh.”

Menurut Johan Silas (Nur Fitri Khoirunnisa, 2012: 2) “Pengertian pemukiman kumuh yang kedua ialah kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkembangan kota yang semula baik, lambat laun menjadi kumuh yang disebabkan oleh adanya mobilitas sosial ekonomi yang stagnan.”

B. KARAKTERISTIK DAN KRITERIA PEMUKIMAN KUMUH

Menurut Avelar et al. (2008) karakteristik permukiman kumuh mempunyai kondisi perumahan dengan kepadatan tinggi dan ukuran unit perumahan relatif kecil, atap rumah di daerah kumuh biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan dinding. Karakteristik pemukiman kumuh yang paling menonjol adalah kualitas bangunan rumahnya yang tidak permanen, dengan kerapatan bangunan yang tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan

yang sangat terbatas walaupun ada berupa gang-gang sempit yang berliku-liku, tidak adanya saluran drainase dan tempat penampungan sampah, sehingga terlihat kotor. Tidak jarang pula pemukiman kumuh terdapat di daerah yang secara berkala mengalami banjir (Rebekka, 1991).

Menurut Araujo et al (2023) Kriteria untuk menentukan kondisi kekumuhan pada permukiman kumuh dapat dilihat berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu:

- a. permukiman kumuh sangat padat dan tidak memenuhi persyaratan tata ruang;
- b. permukiman kumuh dari perspektif jalan lingkungan, yaitu kualitas jalan lingkungan yang buruk;
- c. permukiman kumuh dilihat dari segi drainase lingkungan, yaitu kualitas drainase lingkungan yang buruk ditandai oleh limpasan air hujan yang tidak dapat dialirkan; serta
- d. kondisi sarana prasarana yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Lebih lanjut kriteria permukiman kumuh juga dijelaskan dalam UN-Habitat (2008) yaitu:

- a) tidak tersedia fasilitas sarana prasarana permukiman dengan baik;
- b) tidak memadainya ketersediaan sanitasi beserta infrastrukturnya;
- c) kualitas bangunan yang rendah;
- d) ruang huni yang padat; serta
- e) status hunian yang tidak aman.

Menurut hasil penelitian Suparlan (2000), ciri-ciri dari permukiman kumuh adalah:

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga

mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - a. Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c. Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kriteria kumuh yang digunakan lebih didasari pada penjelasan bahwa kumuh merupakan suatu keadaan fisik kawasan permukiman yang buruk/rendah serta tidak memenuhi standar kelayakan yang merupakan dampak dari beberapa faktor penyebab baik fisik dan nonfisik.

C. PEMUKIMAN KUMUH PADA ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL

Dilihat dari kondisi sosial ekonomi, lingkungan permukiman kumuh ditandai dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah serta mata pencaharian yang tidak homogeny dan sebagian besar berada di sektor informal (Pratiwi,

2021).

Menurut Araujo et al (2023) Faktor ekonomi merupakan faktor prioritas yang paling menyebabkan permukiman kumuh. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Krisandriyana (2017) bahwa faktor ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan adanya permukiman kumuh. Teori tersebut juga dijelaskan oleh Sadyohutomo (2008), bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menyebabkan adanya permukiman kumuh karena mereka tidak mampu mendirikan bangunan hunian yang layak sehingga cenderung membangun hunian di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hunian yang didirikan di lahan tidak sesuai dengan peruntukannya dan rata-rata memiliki kondisi bangunan yang tidak memiliki legalitas atau sertifikat.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Menurut Wicaksono dalam Sukari (2010): “Permukiman kumuh adalah lingkungan tempat tinggal yang telah mengalami penurunan kualitas baik secara fisik, ekonomi, sosial dan budaya.”

Menurut Muchadenyiks (2018): “Kumuh mencakup berbagai permasalahan-permasalahan seperti permukiman yang ilegal, air bersih dan sanitasi.”

Menurut Tjuk Kuswartojo (2005): “Permukiman kumuh adalah lingkungan tempat tinggal yang padat, sarana dan prasarana yang minim serta merupakan perwujudan dari kemiskinan.”

Menurut Panju (dalam Keman, 2005) menjelaskan bahwa “penyebab penurunan kualitas permukiman dipengaruhi oleh kondisi social yang belum mendukung, kondisi ekonomi yang rendah, lingkungan fisik dan kebijakan pemerintah yang belum dapat memberikan ketersediaan lahan ataupun program-program pembangunan perumahan yang tidak konsisten.”

“Keberadaan kawasan kumuh disebabkan dua faktor meliputi faktor bersifat langsung dan bersifat tidak langsung. Faktor bersifat langsung

meliputi faktor fisik seperti kondisi perumahan, koefisien dasar bangunan (KDB), hak milik lahan, kepadatan bangunan, dan kondisi prasarana. Sedangkan yang bersifat tidak langsung meliputi faktor ekonomi, sosial dan budaya.” (Hariyanto, 2008)

Menurut Jogja (2013), “Beberapa kriteria permukiman ramah lingkungan yaitu lokasi permukiman berada pada peruntukan lahan yang tepat, optimasi pemanfaatan lahan, menerapkan zero water dan zero waste, pengendalian pencemaran udara , dan green building code atau bangunan ramah lingkungan.”

Kemudian menurut Sibra dan Muzayanah (2020), “Kriteria rumah ramah lingkungan apabila rumah memiliki ruang terbuka hijau, atap hijau, dinding hijau, penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan, memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami, efisiensi penggunaan energi atau listrik, sistem sanitasi yang baik, dan memiliki pengolahan limbah rumah tangga yang baik.”

Menurut Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (Yunia Intan Kharisma, 2020: 4), “Kawasan kumuh (slum area) adalah kawasan yang secara fisik, ekonomi, social dan budaya politik mengalami degradasi dan atau melekat beberapa masalah, sehingga daya dukung lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Lokasi kajian adalah di kabupaten Luwu Timur dan terkhusus di wilayah perumahan dan pemukiman kumuh sesuai dengan Surat keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 169 / D-06 / IV / 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

B. JENIS PENELITIAN

Metode penelitian untuk kajian ini adalah menggunakan kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*). Salah satu keuntungan utama menggabungkan kekuatan penelitian kualitatif dan kuantitatif yakni memberikan penekanan pada konteks, proses, dan interaksi pengukuran yang tepat terhadap sikap dan hasil. Dalam penelitian *mixed methods*, peneliti memiliki fleksibilitas dalam memilih metode pengumpulan data, penyajian hasil dapat meyakinkan berdasarkan data angka yang menjadi barometer mendalam dari kajian ini.

Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian dengan teknik wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi. Sedangkan Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan alat olah data statistik, oleh karena itu data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka sesuai dengan pengumpulan data survei.

C. Tahapan Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan juga masukan dalam upaya pengembangan permukiman yang layak di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini melalui 2 tahapan, yakni:

1. Tahap pertama, menganalisis faktor dan permasalahan penyebab permukiman kumuh melalui perbandingan antara populasi dan tingkat ketersediaan lahan dan hunian di Kabupaten Luwu Timur. Data diperoleh dari Forum Group Discussion, wawancara dan pengisian kuesioner kepada kepala keluarga yang berada di kawasan permukiman kumuh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *Diagram Fishbone*.
2. Tahap kedua, Teknik analisis data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah teknik statistik deskriptif. Pada teknik ini, data pernyataan dari respondem dalam hal ini adalah kepala keluarga yang berada dalam Kawasan dan Pemukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur, dan selanjutnya diukur menggunakan skala penilaian antara 1-5, dimana nilai 1 adalah skor pernyataan paling rendah dan nilai 5 adalah skor pernyataan paling tinggi.
3. Tahap Ketiga : Dalam melihat dan merekomendasikan kebijakan strategis dalam penanganan pumukiman dan perumahan kumuh di Kabupeten Luwu Timur, maka selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis swot (strategi S-O, Strategi S-T, Strategi W-O dan Strategi W-T0).

D. SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder yakni suatu data yang akan diperoleh melalui kajian literatur dan kunjungan instansional untuk memperoleh data kondisi permukiman dan perumahan kumuh yang akan menjadi fokus kajian.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang akan diperoleh melalui kunjungan lapangan untuk melihat dan mengkaji pelaku maupun *stakeholder* terkait.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

a. STUDI LITERATUR

Merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca atau mengambil literatur laporan, jurnal, bahan seminar, bahan perkuliahan, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu penanganan permasalahan kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Luwu Timur.

b. OBSERVASI

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sumber penelitian di lapangan, yaitu dalam kegiatan yang berhubungan dengan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur. Melakukan tinjauan langsung sesuai kondisi di lapangan untuk memperoleh data yang konkret. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan sketsa secara jelas tentang kondisi eksisting dengan masalah-masalah yang ada dan mengetahui petunjuk cara memecahkan masalah tersebut.

c. WAWANCARA

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (petunjuk umum wawancara) dan percakapan tersebut direkam dengan menggunakan Handphone. Untuk mempermudah perolehan data dari wawancara maka dibutuhkan beberapa alat/perlengkapan berupa : (1) Buku tulis dan bolpoin guna mencatat semua pertanyaan yang diajukan dan jawaban dari narasumber, (2) Telefon genggam/alat perekam untuk merekam setiap percakapan yang dilakukan dengan narasumber.

Informan ditentukan secara purposive, dimana peneliti menentukan sesuai kriteria informan yang dianggap banyak memiliki informasi sesuai posisi yang didudukinya, yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang cukup dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang obyek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun yang

menjadi informan dalam wawancara penelitian ini yaitu pemerintah, baik dinas terkait, kecamatan dan kepala desa yang masuk kategori permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur.

d. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD dimaksudkan juga untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.

Focus Group Discussion (FGD) juga mengundang para informan kunci untuk mendiskusikan beberapa konsep yang berkaitan dengan data yang diungkap atau dapat juga menjawab beberapa pertanyaan penelitian. (Komariah dan Satori, 2012:96). Tujuan FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik, yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti (Kresno S. dkk., (1999) dalam Paramita A. & Kristiana L., 2013).

Diskusi ini dibuat untuk menyamakan persepsi antara peneliti, stakeholder, dengan masyarakat mengenai permasalahan permukiman dan perumahan kumuh di Luwu Timur, diharapkan dengan diadakannya diskusi, masyarakat dan pemerintah lebih memahami permasalahan yang dihadapi dalam kawasan yang ditetapkan sebagai permukiman dan perumahan kumuh.

e. KUOSIONER

Menurut Sugiyono (2017:142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh seorang yang melakukan suatu penelitian guna mengukur suatu fenomena yang telah terjadi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu daftar pernyataan yang disusun secara tertulis dengan tujuan untuk memperoleh data berupa jawaban responden. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang masuk dalam kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur. Kuesioner yang telah diisi dikirimkan ke tim survei yang bertugas untuk memeriksa kuesioner. Jika terdapat kuesioner yang tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data. Kemudian, tim survei menganalisis data dan menyajikan hasil analisis ke dalam bentuk statistik deskriptif.

f. DOKUMENTASI

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

F. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam pengambilan sampel, diperlukan suatu metode yang tepat agar sampel dapat merepresentasikan populasi. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu:

Analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur menggunakan rumus slovin. Jumlah sampel dalam teknik ini diambil berdasarkan rumus Slovin yaitu:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1+N(e)^2} \\ &= \frac{5526}{1+5526(0,10)^2} \\ &= 98,2 \approx 99\end{aligned}$$

Adapun jumlah sample minimal dalam penelitian ini sebanyak 99 Kepala Keluarga, namun peneliti mengambil 136 Kepala Keluarga sebagai sampel. Teknik sampling yang di gunakan yaitu *Proportional Stratifid Random Sampling*. Berikut jumlah sebaran sampel berdasarkan kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 : Jumlah Sebaran Sampel berdasarkan Kecamatan

NO	KAWASAN	JUMLAH KK	JUMLAH SAMPEL
1	Desa Balantang	306	7
2	Desa Wewangriu	368	9
3	Desa Baruga	298	7
5	Desa Lakawali Pantai	243	6
6	Desa Nikkel	426	10
4	Desa Sorowako	352	8
5	Desa Wasuponda	50	2
6	Desa Beringin Jaya	110	3
7	Kelurahan Tomoni	154	4
8	Desa Bawalipu	1673	39
	Desa Lampenai		
9	Desa Balo-balo	74	2
10	Desa Watangpanua	126	3
11	Desa Tampinna	154	4
12	Desa Pattengko	62	2
13	Desa Cendana Hitam	56	2
14	Desa Pekaloea	99	2
15	Desa Wonorejo	164	4
16	Desa Mabonta	212	5
17	Desa Lumbewe	157	4
18	Desa Burau Pantai	222	5
19	Desa Kalitiri	220	5
TOTAL		5526	136

Sumber : Olah Data 2023

G. METODE ANALISIS DATA

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

a. *Diskrifitif Kuantitatif*

Deskripsi kuantitatif mengenai kajian pemukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur dapat dilakukan dengan mengumpulkan data numerik yang menggambarkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi pemukiman tersebut. Menurut hasil penelitian Suparlan (2000), berikut adalah komponen-komponen yang biasanya dikaji secara kuantitatif dalam studi tentang permukiman dan perumahan kumuh adalah

1. Indikator Fisik
 - a. Kondisi bangunan rumah
 - b. Kepadatan penduduk
 - c. Akses air bersih
 - d. Sanitasi
2. Indikator Sosial dan Ekonomi
 - i. Penghasilan Masyarakat
 - ii. Akses terhadap layanan Kesehatan dan Pendidikan
 - iii. Partisipasi Masyarakat
3. Indikator Lingkungan
 - a. Pengelolaan Sampah
 - b. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
 - c. Kualitas Udara
 - d. Pencemaran Lingkungan
4. Indikator Keamanan
 - a. Resiko bencana alam
 - b. Tingkat kejahatan
5. Indikator Legalitas
 - a. Status Kepemilikan tanah
 - b. Kesesuaian tata ruang

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

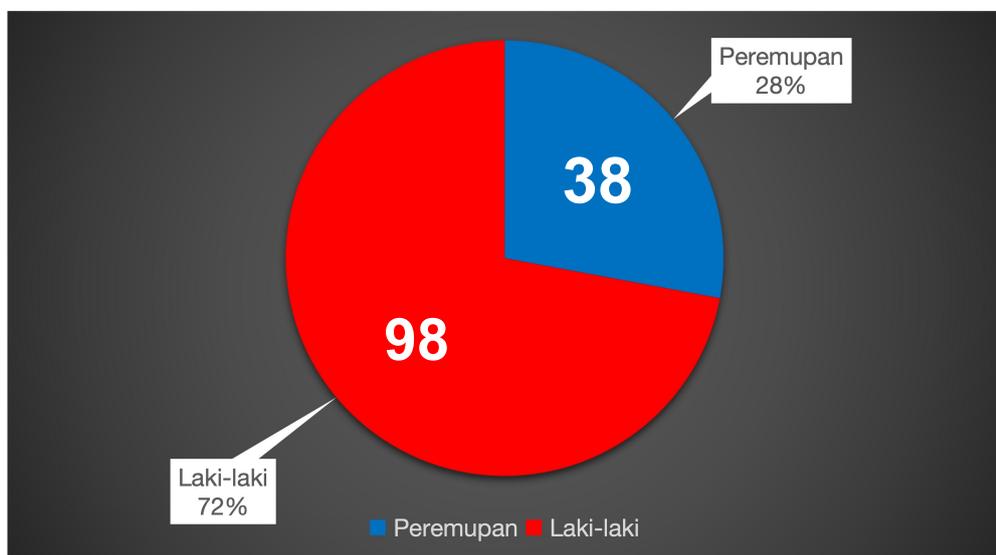
A. Identitas Responden

Deskripsi responden ini merupakan suatu proses mendeskripsikan para responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan perbulan, jumlah Kepala Keluarga dalam rumah dan jumlah tanggungan kepala keluarga yang berada dalam kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur. Pada penelitian didapat sebanyak 136 responden yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dimana hasil ini diketahui dari jumlah hasil penyebaran kuesioner.

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan penelitian, maka gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1 : Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Hasil olah data (2024)

Berdasarkan gambar diatas, distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian mengenai kajian kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, total responden

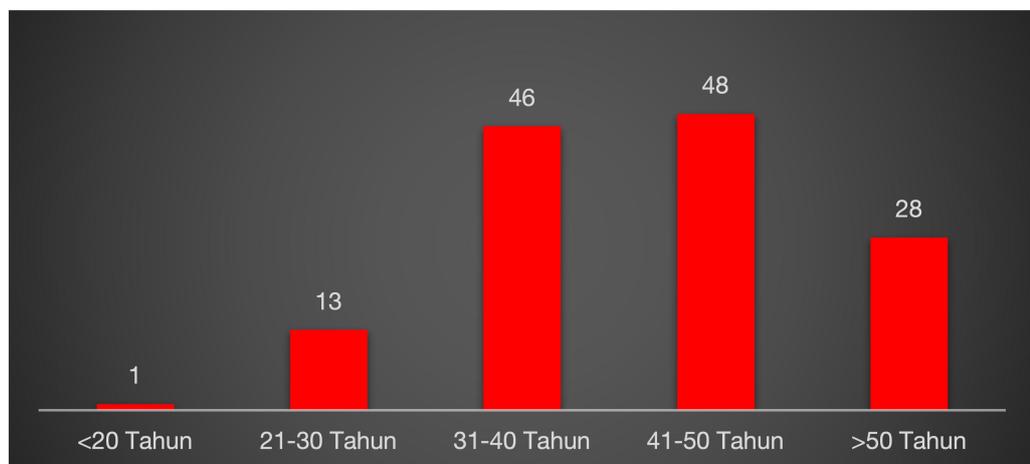
yang dilibatkan berjumlah 136 orang. Distribusi jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki dengan jumlah 98 orang, yang merepresentasikan 72,1% dari total responden. Sementara itu, responden perempuan berjumlah 38 orang atau 27,9% dari keseluruhan.

Dominasi responden laki-laki dalam penelitian ini dapat menggambarkan keterlibatan mereka yang lebih tinggi dalam konteks penelitian, seperti pengambilan keputusan di tingkat komunitas atau keterlibatan dalam pengelolaan kawasan permukiman dan perumahan. Namun, keterwakilan perempuan yang cukup signifikan juga memberikan kontribusi penting untuk memahami aspek-aspek spesifik yang sering kali berkaitan dengan peran perempuan dalam lingkungan rumah tangga dan komunitas.

2. Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan penelitian, maka gambaran mengenai usia responden dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2 : Responden Berdasarkan Usia



Sumber : Hasil olah data SPSS (2024)

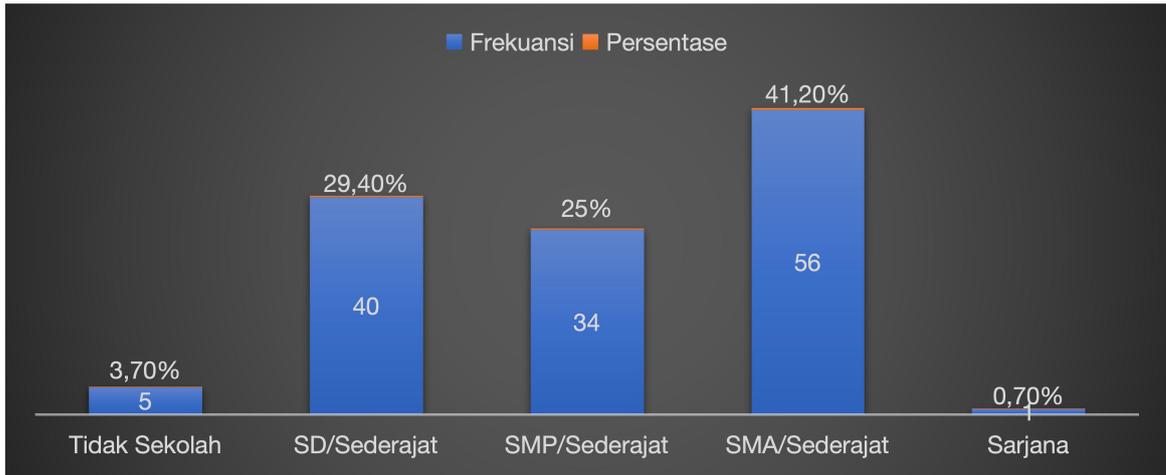
Berdasarkan data distribusi responden berdasarkan usia dalam penelitian mengenai kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, dapat diketahui bahwa responden tersebar dalam lima kategori usia. Kelompok usia di bawah 20 tahun memiliki jumlah responden paling sedikit, yaitu hanya 1 orang (0,7%), yang menunjukkan keterlibatan yang sangat kecil dari kelompok usia muda. Kelompok usia 21-30 tahun mencakup 13 responden atau sebesar 9,6%, yang menunjukkan keterwakilan yang relatif rendah dari kelompok usia awal produktif. Sementara itu, jumlah responden meningkat secara signifikan pada kelompok usia 31-40 tahun, yang mencakup 46 orang (33,8%), dan mencapai puncaknya pada kelompok usia 41-50 tahun dengan 48 responden (35,3%). Kelompok usia ini menjadi yang terbanyak, mengindikasikan peran aktif mereka dalam konteks permukiman dan perumahan.

Kelompok usia di atas 50 tahun juga memberikan kontribusi signifikan dengan jumlah 28 responden (20,6%), mencerminkan pengalaman dan wawasan mereka yang mendalam terhadap kondisi lingkungan. Dengan demikian, mayoritas responden berada pada kelompok usia produktif, yaitu 31-50 tahun, yang secara keseluruhan mencakup lebih dari dua pertiga total responden, sehingga memberikan perspektif yang relevan dan komprehensif dalam penelitian ini.

3. Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan penelitian, maka gambaran mengenai pendidikan terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.3 : Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Hasil olah data (2024)

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas, Berdasarkan data distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada penelitian mengenai kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat, yaitu sebanyak 56 orang (41,2%). Kelompok dengan pendidikan SD atau sederajat berada pada urutan kedua dengan jumlah responden sebanyak 40 orang (29,4%). Responden dengan pendidikan SMP atau sederajat berjumlah 34 orang (25%), yang juga merupakan bagian signifikan dalam penelitian ini. Sementara itu, terdapat 5 responden (3,7%) yang tidak memiliki pendidikan formal. Kelompok dengan

pendidikan tinggi atau sarjana hanya terdiri atas 1 responden (0,7%), menunjukkan keterwakilan yang sangat kecil dari kelompok yang berpendidikan tinggi.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan rendah hingga menengah (SD, SMP, dan SMA), yang mungkin mencerminkan kondisi sosial ekonomi kawasan permukiman kumuh tersebut. Rendahnya keterwakilan responden dengan pendidikan tinggi juga dapat mengindikasikan bahwa isu permukiman kumuh lebih banyak dihadapi oleh masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan intervensi yang mempertimbangkan tingkat pendidikan responden dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka di kawasan permukiman kumuh.

4. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan penelitian, maka gambaran mengenai jenis pekerjaan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.4 : Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan



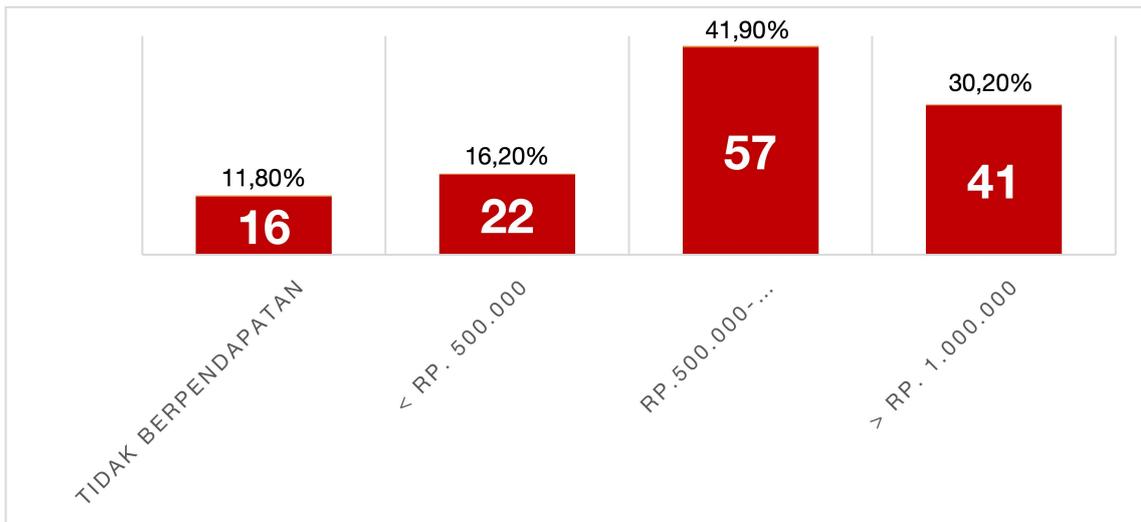
Berdasarkan Gambar 4.4 diatas, Berdasarkan data distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan dalam penelitian mengenai kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, mayoritas responden bekerja sebagai pekerja lepas dengan jumlah sebanyak 82 orang atau 60,3% dari total responden. Pekerja tetap menjadi kelompok terbesar kedua dengan 24 orang (17,6%), yang menunjukkan keterlibatan mereka yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan lebih stabil. Sebanyak 16 orang (11,8%) responden termasuk dalam kategori tidak bekerja, mencerminkan keterlibatan individu yang tidak memiliki pekerjaan formal atau penghasilan tetap. Responden yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 8 orang (5,9%), sementara kelompok lainnya, yang meliputi jenis pekerjaan di luar kategori yang disebutkan, hanya terdiri atas 6 orang (4,4%).

Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pekerjaan tidak tetap atau informal, yang mungkin menjadi cerminan kondisi sosial ekonomi kawasan permukiman kumuh. Hal ini juga menegaskan bahwa ketergantungan pada pekerjaan informal cukup tinggi di daerah tersebut. Dengan latar belakang pekerjaan yang beragam ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas permukiman serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan kumuh.

5. Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Berdasarkan penelitian, maka gambaran mengenai pendapatan perbulan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.5 : Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan



Sumber : Hasil olah data (2024)

Berdasarkan Gambar 4.5 diatas, Berdasarkan data distribusi responden berdasarkan pendapatan bulanan dalam penelitian mengenai kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, mayoritas responden memiliki pendapatan di rentang Rp500.000 hingga Rp1.000.000, yakni sebanyak 57 orang atau 41,9% dari total responden. Kelompok dengan pendapatan di atas Rp1.000.000 merupakan yang terbesar kedua dengan jumlah 41 orang atau 30,2%. Sebanyak 22 responden (16,2%) memiliki pendapatan di bawah Rp500.000, yang mencerminkan kelompok dengan pendapatan sangat rendah. Selain itu, terdapat 16 responden (11,8%) yang tidak memiliki

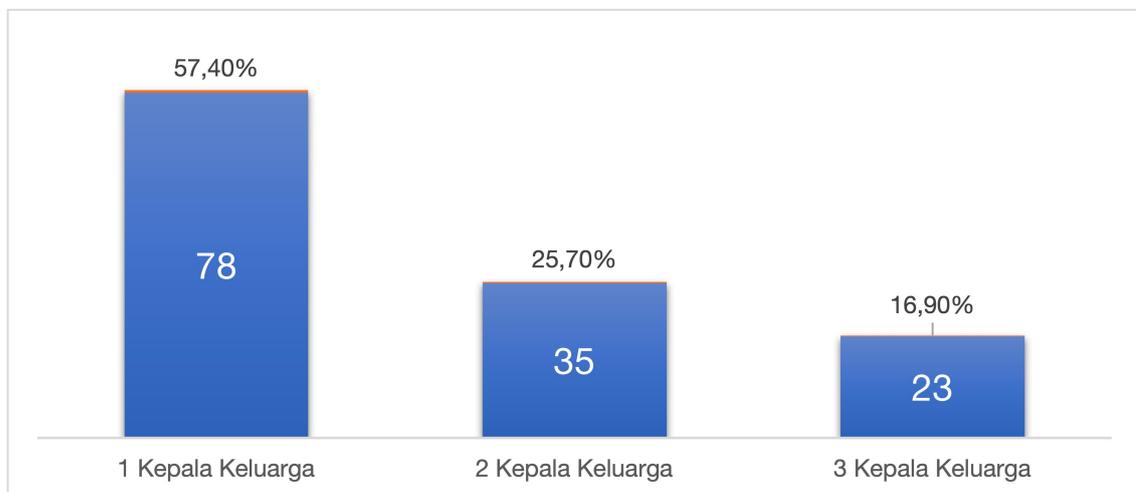
pendapatan sama sekali, menunjukkan keterwakilan masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada pihak lain atau tidak memiliki sumber penghasilan tetap.

Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori pendapatan rendah hingga menengah, yang mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di kawasan permukiman kumuh. Data ini penting untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperbaiki kondisi permukiman mereka, sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan intervensi yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut..

6. Respondan Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga Dalam Rumah

Berdasarkan penelitian, maka gambaran responden berdasarkan jumlah kepala keluarga dalam rumah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.6 Respondan Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga Dalam Rumah



Sumber : Hasil olah data (2024)

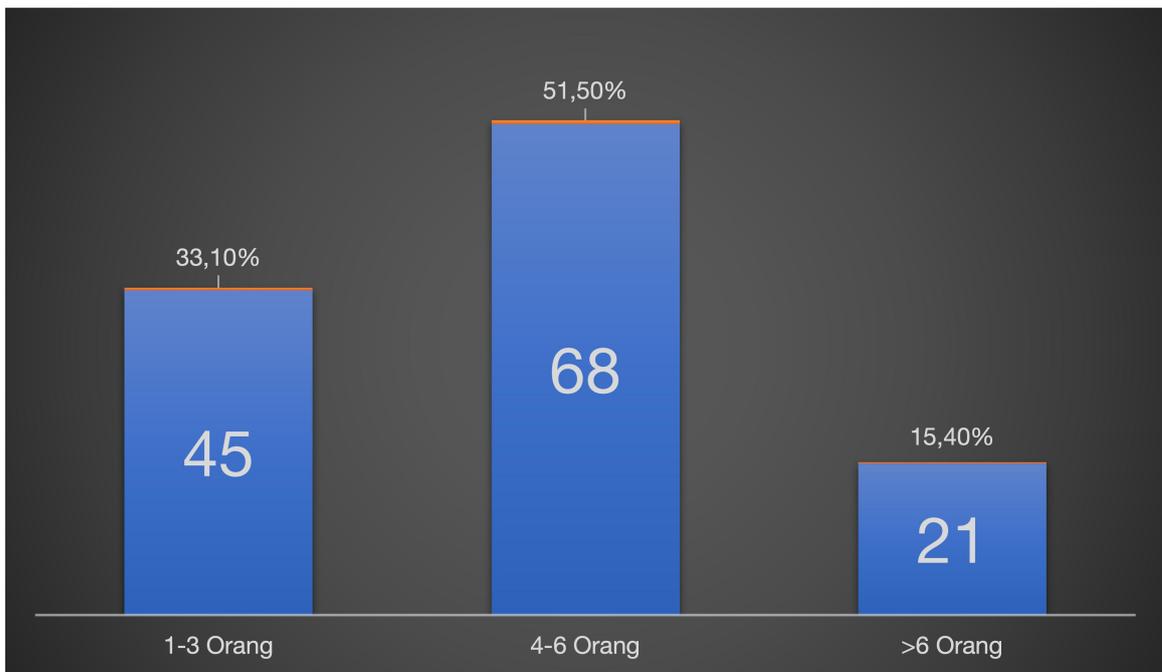
Berdasarkan Gambar 4.6 diatas, Berdasarkan data distribusi responden berdasarkan jumlah kepala keluarga dalam satu rumah pada penelitian mengenai kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, mayoritas responden terdiri dari rumah dengan satu kepala keluarga, yaitu sebanyak 78 rumah (57,4%). Rumah dengan dua kepala keluarga berada di posisi kedua, dengan jumlah sebanyak 35 rumah atau 25,7%. Sementara itu, rumah dengan tiga kepala keluarga berjumlah 23 rumah atau 16,9% dari total responden.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tinggal di rumah dengan konfigurasi satu kepala keluarga, yang kemungkinan besar mencerminkan pola keluarga inti. Namun, keberadaan rumah dengan dua atau tiga kepala keluarga mengindikasikan adanya fenomena hunian yang padat, di mana lebih dari satu keluarga tinggal bersama dalam satu rumah. Hal ini dapat menjadi indikator adanya keterbatasan akses terhadap perumahan yang layak, yang sering kali menjadi salah satu ciri kawasan permukiman kumuh. Temuan ini memberikan dasar penting untuk menilai kebutuhan hunian di wilayah tersebut dan merancang solusi yang dapat mengurangi kepadatan rumah tangga demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat..

7. Respondan Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Berdasarkan penelitian, maka gambaran responden berdasarkan jumlah tanggungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.7 : Respondan Berdasarkan Jumlah Tanggungan



Sumber : Hasil olah data (2024)

Berdasarkan Gambar 4.6 diatas, Berdasarkan data distribusi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dalam penelitian mengenai kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, sebagian besar responden memiliki jumlah tanggungan antara 4 hingga 6 orang, dengan frekuensi sebanyak 70 keluarga atau 51,5% dari total responden. Kelompok dengan jumlah tanggungan 1 hingga 3 orang mencakup 45 keluarga atau 33,1%, sedangkan responden dengan jumlah tanggungan lebih dari 6 orang berjumlah 21 keluarga atau 15,4%.

Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas keluarga dalam

kawasan tersebut memiliki tanggungan yang relatif besar, yang dapat mencerminkan tingginya beban ekonomi yang dihadapi oleh kepala keluarga. Hal ini relevan dengan kondisi sosial ekonomi di kawasan permukiman kumuh, di mana tingkat penghasilan sering kali tidak sebanding dengan jumlah tanggungan, sehingga berdampak pada kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Informasi ini menjadi penting untuk memahami kebutuhan dasar masyarakat di kawasan tersebut, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak, serta menjadi dasar dalam merancang program intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

B. Deskripsi Indikator Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kumuh Di Kabupaten Luwu Timur

Kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur diidentifikasi berdasarkan sejumlah indikator yang mencerminkan kualitas lingkungan tempat tinggal. Indikator utama meliputi kondisi bangunan rumah, akses terhadap air bersih, jaringan drainase, pengelolaan limbah, aksesibilitas jalan lingkungan, dan ketersediaan ruang terbuka hijau. Bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kelayakan, seperti konstruksi tidak permanen atau padatnya pemukiman, menjadi ciri utama kawasan kumuh. Selain itu, minimnya akses air bersih dan buruknya sistem sanitasi meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Drainase yang tidak memadai sering kali menyebabkan genangan atau banjir,

sementara sistem pengelolaan limbah yang kurang optimal berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Kurangnya ruang terbuka hijau serta akses jalan yang terbatas juga menghambat mobilitas dan kualitas hidup penduduk. Dengan identifikasi indikator-indikator ini, pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat menetapkan prioritas dan strategi intervensi untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara berkelanjutan.

1. Indikator Kondisi Fisik

Indikator fisik merupakan aspek utama dalam mengidentifikasi kondisi kawasan permukiman dan perumahan kumuh di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Luwu Timur. Berikut table hasil penelitian terkait indikator fisik yang terdiri dari Kondisi bangunan rumah, Kepadatan penduduk, Akses air bersih dan Sanitasi.

Tabel 4.1 : Deskripsi Dimensi Kondisi Fisik kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur

No.	Indikator	Skor	Rata-rata
1	Kondisi bangunan rumah	2.88	3.10
2	Kepadatan penduduk	2.51	
3	Akses air bersih	3.61	
4	Sanitasi	3.01	

Sumber : Olah data (2024)

Berdasarkan Tabel 4.1, dimensi fisik kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur dinilai melalui empat indikator utama: kondisi bangunan rumah, kepadatan penduduk, akses terhadap air bersih, dan sanitasi. Kondisi bangunan rumah memperoleh skor sebesar 2,88, mengindikasikan bahwa banyak rumah di kawasan tersebut belum memenuhi standar kelayakan, baik dari segi material maupun struktur. Kepadatan penduduk memiliki skor

terendah, yaitu 2,51, yang menunjukkan tekanan akibat tingginya populasi dalam area terbatas sehingga berdampak pada kualitas hidup. Sementara itu, akses terhadap air bersih mencatat skor tertinggi sebesar 3,61, menandakan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap air bersih dibandingkan aspek lainnya. Sanitasi juga cukup memadai dengan skor 3,01, meskipun masih memerlukan perbaikan agar lebih optimal. Secara keseluruhan, rata-rata skor dimensi fisik mencapai 3,10, yang menunjukkan kondisi sedang, di mana beberapa aspek, terutama kondisi bangunan rumah dan kepadatan penduduk, masih membutuhkan perhatian dan intervensi untuk meningkatkan kualitas permukiman.

2. Indikator Sosial Ekonomi

Indikator sosial dan ekonomi mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman dan perumahan kumuh. Indikator ini digunakan untuk memahami tantangan yang dihadapi masyarakat secara lebih luas, meliputi aspek pendapatan, akses terhadap layanan dasar, hingga keterlibatan warga dalam pembangunan lingkungan.

Tabel 4.2: Deskripsi Dimensi Sosial dan Ekonomi di kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur

No.	Indikator	Skor	Rata-rata
1	Penghasilan Masyarakat	2.94	2.80
2	Akses terhadap layanan Kesehatan dan Pendidikan	2.96	
3	Partisipasi Masyarakat	2.35	

Sumber : Olah data (2024)

Berdasarkan Tabel 4.2, dimensi sosial dan ekonomi kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur diukur melalui tiga indikator utama, yaitu penghasilan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta partisipasi masyarakat. Penghasilan masyarakat memiliki skor sebesar 2,94, yang menunjukkan tingkat pendapatan yang relatif rendah namun mendekati kategori sedang. Indikator akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan mencatat skor tertinggi, yaitu 2,96, yang mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup baik terhadap fasilitas dasar tersebut meskipun masih memerlukan perbaikan. Sementara itu, indikator partisipasi masyarakat mendapatkan skor terendah, yaitu 2,35, yang menunjukkan rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Secara keseluruhan, rata-rata skor dimensi sosial dan ekonomi berada pada angka 2,80, yang menggambarkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi di kawasan ini masih memerlukan intervensi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Indikator Lingkungan

Indikator lingkungan merupakan aspek penting yang menentukan kualitas hidup di kawasan permukiman dan perumahan kumuh. Lingkungan yang tidak sehat dapat memperparah kondisi kehidupan masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun estetika lingkungan.

Tabel 4.3: Deskripsi Dimensi Lingkungan di kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur

No.	Indikator	Skor	Rata-rata
1	Pengelolaan Sampah	2.92	3.28
2	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	3.89	
3	Kualitas Udara	3.93	
4	Pencemaran Lingkungan	2.74	

Sumber : Olah data (2024)

Berdasarkan Tabel 4.3, deskripsi dimensi lingkungan di kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur meliputi empat indikator utama. Indikator pengelolaan sampah memperoleh skor 2,92, yang menunjukkan perlunya peningkatan pengelolaan limbah di wilayah tersebut. Ketersediaan ruang terbuka hijau mendapatkan skor 3,89, menandakan kondisi yang cukup baik dalam menyediakan area hijau untuk lingkungan. Kualitas udara menunjukkan hasil yang relatif baik dengan skor tertinggi, yaitu 3,93, menandakan udara di wilayah ini masih tergolong sehat. Namun, pencemaran lingkungan memiliki skor terendah, yakni 2,74, mengindikasikan bahwa masalah pencemaran masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, rata-rata skor dimensi lingkungan mencapai 3,28, mencerminkan kondisi lingkungan yang cukup memadai namun membutuhkan perhatian lebih pada aspek tertentu seperti pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan.

4. Indikator Keamanan

Indikator keamanan menjadi aspek krusial dalam menilai kelayakan kawasan permukiman dan perumahan kumuh. Keamanan yang rendah tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.

Tabel 4.4: Deskripsi Dimensi Keamanan di kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur

No.	Indikator	Skor	Rata-rata
1	Resiko Bencana Alam	2.34	2.51
2	Tingkat Kejahatan	2.69	

Sumber : Olah data (2024)

Berdasarkan Tabel 4.4, deskripsi dimensi keamanan di kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur meliputi dua indikator utama. Indikator risiko bencana alam memperoleh skor 2,34, yang menunjukkan tingkat kerentanan terhadap bencana alam cukup tinggi dan memerlukan upaya mitigasi lebih lanjut. Indikator tingkat kejahatan memperoleh skor 2,69, menunjukkan adanya potensi ancaman keamanan yang juga perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, rata-rata skor dimensi keamanan adalah 2,51, yang mencerminkan bahwa kondisi keamanan di wilayah ini masih berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi mitigasi bencana maupun pengendalian tingkat kejahatan.

5. Indikator Legalitas

Indikator legalitas menjadi salah satu aspek penting dalam menilai kawasan permukiman dan perumahan kumuh. Legalitas mencerminkan status hukum yang memengaruhi keberlanjutan dan pengembangan kawasan tersebut

Tabel 4.5: Deskripsi Dimensi Legalitas di kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur

No.	Indikator	Skor	Rata-rata
1	Status Kepemilikan Tanah	4.02	3.65
2	Kesesuaian Tata Ruang	2.91	

Sumber : Olah data (2024)

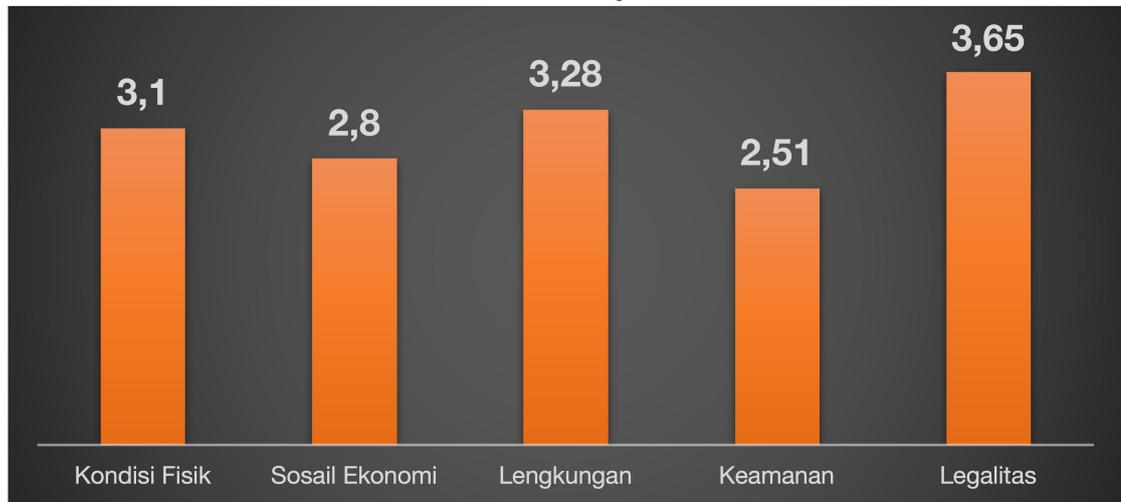
Berdasarkan Tabel 4.5, deskripsi dimensi legalitas di kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur mencakup dua indikator. Indikator status kepemilikan tanah memiliki

skor tertinggi, yaitu 4,02, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki legalitas kepemilikan tanah yang baik. Sebaliknya, indikator kesesuaian tata ruang memperoleh skor 2,91, mengindikasikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan lahan terhadap perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, rata-rata skor dimensi legalitas adalah 3,65, yang mencerminkan bahwa aspek legalitas di wilayah ini cukup memadai, meskipun kesesuaian tata ruang memerlukan perhatian lebih untuk peningkatan ke depannya.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Permasalahan Perumahan Dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Luwu Timur

Permasalahan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini mencakup dimensi fisik, sosial ekonomi, lingkungan, keamanan, dan legalitas, yang masing-masing memiliki kontribusi terhadap kondisi kumuh di kawasan tersebut. Dimensi lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah, kualitas udara, dan pencemaran, sedangkan dimensi keamanan meliputi risiko bencana alam dan tingkat kejahatan. Selain itu, dimensi legalitas, seperti status kepemilikan tanah dan kesesuaian tata ruang, juga menjadi penyebab utama yang memengaruhi kualitas permukiman. Untuk memahami lebih lanjut, setiap dimensi akan disajikan melalui diagram yang memberikan gambaran rinci mengenai faktor-faktor tersebut.

Gambar 4.8: Gambaran Faktor Penyebab Terjadinya Perumahan Dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Olah Data Penelitian (2024)

Berdasarkan gambar 4.8, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur mencakup lima dimensi utama yang saling memengaruhi. Dimensi legalitas memiliki skor tertinggi, yaitu 3,65, menunjukkan pentingnya pengelolaan legalitas, seperti status kepemilikan tanah dan tata ruang, dalam mengatasi masalah permukiman kumuh. Dimensi lingkungan mendapatkan skor 3,28, yang menyoroti permasalahan terkait pengelolaan sampah, kualitas udara, dan pencemaran lingkungan. Dimensi fisik memperoleh skor 3,1, yang mencerminkan tantangan dalam aspek infrastruktur dan kualitas bangunan. Selanjutnya, dimensi sosial ekonomi memiliki skor 2,8, menunjukkan kontribusi dari rendahnya kesejahteraan masyarakat terhadap kondisi kumuh. Terakhir, dimensi keamanan memiliki skor terendah, yaitu 2,51, mengindikasikan bahwa aspek keamanan, termasuk risiko bencana alam dan tingkat kejahatan, turut memperburuk kondisi permukiman. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini menggambarkan kompleksitas permasalahan yang memerlukan solusi terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan gambaran faktor penyebab terjadinya perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur, solusi yang ditawarkan

kepada pemerintah dapat dirumuskan berdasarkan prioritas dari dimensi dengan skor terendah hingga tertinggi:

- 1. Keamanan (Skor: 2,51):** Dimensi keamanan memiliki skor terendah, sehingga menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu meningkatkan upaya mitigasi risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana serta penyusunan dan sosialisasi rencana tanggap darurat. Selain itu, penguatan keamanan masyarakat dapat dilakukan dengan memperbanyak patroli keamanan, penerapan teknologi keamanan, serta pemberdayaan masyarakat melalui program keamanan berbasis komunitas.
- 2. Sosial Ekonomi (Skor: 2,80):** Untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemerintah dapat mengadakan pelatihan keterampilan, pemberian akses modal usaha, dan program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, pemberian subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat membantu mereka mendapatkan hunian yang layak.
- 3. Kondisi Fisik (Skor: 3,10):** Dalam dimensi fisik, pemerintah dapat memprioritaskan renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi. Selain itu, perencanaan dan pengawasan pembangunan perumahan perlu diperketat untuk memastikan bahwa kualitas infrastruktur memenuhi standar yang layak.
- 4. Lingkungan (Skor: 3,28):** Solusi pada dimensi lingkungan melibatkan peningkatan pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai serta edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Pengembangan ruang terbuka hijau juga penting untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi tingkat pencemaran.
- 5. Legalitas (Skor: 3,65):** Meskipun memiliki skor tertinggi, dimensi legalitas tetap memerlukan perhatian. Pemerintah dapat mempercepat proses sertifikasi tanah dan memastikan bahwa tata ruang yang telah

direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya kawasan kumuh baru.

Dengan pendekatan yang terstruktur berdasarkan prioritas ini, pemerintah dapat mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur secara bertahap namun efektif.

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perumahan Dan Pemukiman Kumuh berdasarkan sebaran di kecamatan Kabupaten Luwu Timur

Permasalahan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor umum, tetapi juga dipengaruhi oleh sebaran kondisi di masing-masing kecamatan. Setiap kecamatan memiliki karakteristik dan tantangan spesifik yang berkontribusi terhadap tingkat kekumuhan, baik dari dimensi fisik, sosial ekonomi, lingkungan, keamanan, maupun legalitas. Sebaran ini mencerminkan variasi dalam kebutuhan dan prioritas intervensi di setiap wilayah, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda-beda untuk penanganannya. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, berikut ini disajikan diagram per dimensi berdasarkan sebaran di kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kecamatan.

1. Dimensi Kondisi Fisik dalam sebaran kecamatan

Gambar 4.9: Dimensi Kondisi Fisik Berdasarkan Sebaran Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur



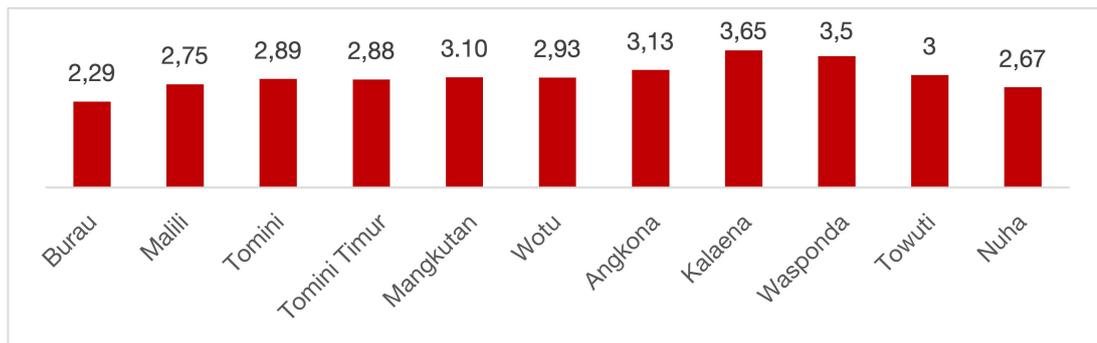
Sumber : Olah Data (2024)

Berdasarkan Gambar 4.9, dimensi fisik perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur, yang diukur berdasarkan kondisi bangunan rumah, kepadatan penduduk, akses air bersih, dan sanitasi, menunjukkan variasi skor antar kecamatan. Kecamatan Burau mencatat skor tertinggi sebesar 3,63, mengindikasikan kondisi fisik yang relatif lebih baik dibanding kecamatan lainnya. Kecamatan Nuha, Malili, Wasponda, dan Towuti memiliki skor yang cukup baik, berkisar antara 3,05 hingga 3,15, mencerminkan akses infrastruktur dasar yang lebih memadai. Sementara itu, kecamatan dengan skor lebih rendah, seperti Tomoni Timur (2,85), Angkona (2,75), dan Wotu (2,91), menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam hal kondisi bangunan, akses sanitasi, dan air bersih. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi lebih intensif di kecamatan-kecamatan tersebut untuk meningkatkan kualitas fisik perumahan.

Secara umum, skor menunjukkan bahwa meskipun ada kecamatan dengan kondisi fisik yang lebih baik, beberapa kecamatan masih memerlukan perhatian khusus untuk memperbaiki infrastruktur dasar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Data ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk memprioritaskan program peningkatan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan tiap kecamatan.

2. Dimensi Sosial Ekonomi dalam sebaran kecamatan

Gambar 4.10: Dimensi Sosial Ekonomi Berdasarkan Sebaran Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Olah Data (2024)

Berdasarkan Gambar 4.10, dimensi sosial ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, yang diukur melalui indikator penghasilan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta partisipasi masyarakat, menunjukkan perbedaan skor di setiap kecamatan. Kecamatan Kalaena memiliki skor tertinggi sebesar 3,65, diikuti oleh Wasponda dengan skor 3,50. Hal ini mencerminkan bahwa kedua kecamatan tersebut memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, termasuk akses yang lebih memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi.

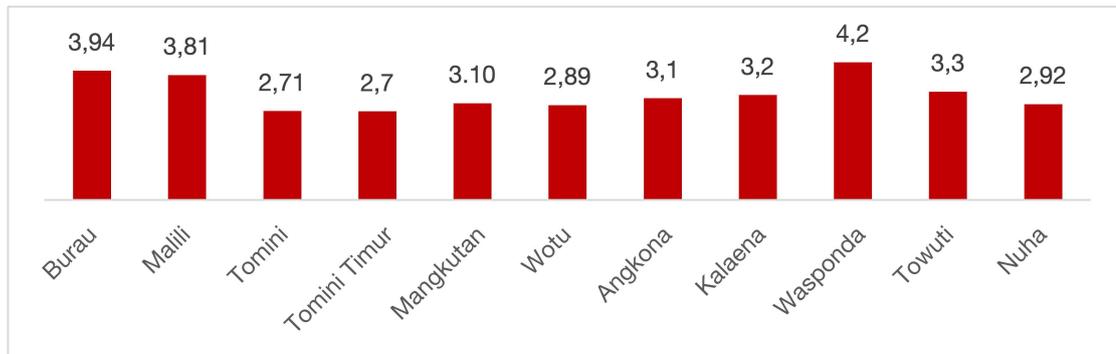
Sebaliknya, Kecamatan Burau mencatat skor terendah sebesar 2,29, menunjukkan tantangan signifikan dalam hal penghasilan masyarakat, akses layanan dasar, serta partisipasi masyarakat. Kecamatan Malili (2,75) dan Nuha (2,67) juga menunjukkan skor rendah, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

Kecamatan lainnya, seperti Wotu (2,93), Angkona (3,13), Mangkutana (3,10), dan Tomini Timur (2,88), memiliki skor yang berada di tingkat menengah, mengindikasikan adanya potensi untuk perbaikan lebih lanjut, khususnya dalam meningkatkan akses layanan dasar dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai prioritas intervensi pemerintah, dengan fokus utama pada kecamatan-kecamatan dengan skor rendah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses layanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Dimensi Lingkungan dalam sebaran kecamatan

Gambar 4.11: Dimensi Lingkungan Berdasarkan Sebaran Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Olah Data (2024)

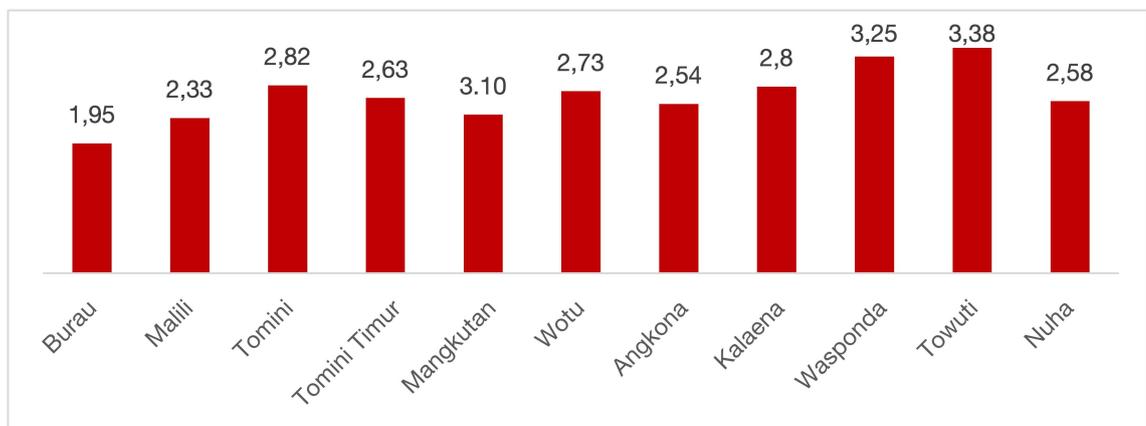
Berdasarkan Gambar 4.11, dimensi lingkungan di Kabupaten Luwu Timur, yang diukur melalui indikator pengelolaan sampah, ketersediaan ruang terbuka hijau, kualitas udara, dan pencemaran lingkungan, menunjukkan variasi skor di tiap kecamatan. Kecamatan Wasponda memiliki skor tertinggi sebesar 4,20, mencerminkan pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk dalam pengelolaan sampah, ketersediaan ruang hijau, dan kualitas udara yang relatif terjaga. Kecamatan Burau dan Malili menyusul dengan skor masing-masing 3,94 dan 3,81, menunjukkan kondisi lingkungan yang cukup baik di kedua wilayah tersebut.

Sebaliknya, Kecamatan Tomoni Timur dan Tomoni mencatat skor terendah, yaitu 2,7 dan 2,71, yang mengindikasikan tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan, termasuk rendahnya akses terhadap ruang terbuka hijau dan tingginya pencemaran lingkungan. Kecamatan Wotu (2,89) dan Nuha (2,92) juga mencatat skor rendah, menandakan perlunya intervensi lebih besar di wilayah-wilayah ini. Kecamatan lainnya, seperti Mangkutana (3,10), Angkona (3,1), Kalaena (3,2), dan Towuti (3,3), menunjukkan skor menengah, yang mencerminkan kondisi lingkungan yang masih dapat ditingkatkan dengan fokus pada pengelolaan sampah dan pengurangan pencemaran.

Dengan data ini, pemerintah dapat memprioritaskan kecamatan dengan skor rendah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan melalui program pengurangan pencemaran, perluasan ruang terbuka hijau, dan edukasi pengelolaan sampah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

4. Dimensi Kemanan dalam sebaran kecamatan

Gambar 4.12: Dimensi Kemanan Berdasarkan Sebaran Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Olah Data (2024)

Berdasarkan Gambar 4.12, dimensi keamanan di Kabupaten Luwu Timur, yang diukur melalui indikator risiko bencana alam dan tingkat kejahatan, menunjukkan variasi skor antar kecamatan. Kecamatan Towuti mencatat skor tertinggi sebesar 3,38, diikuti oleh Wasponda (3,25) dan Kalaena (2,80), yang mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah ini relatif lebih aman dengan tingkat risiko bencana dan kejahatan yang lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

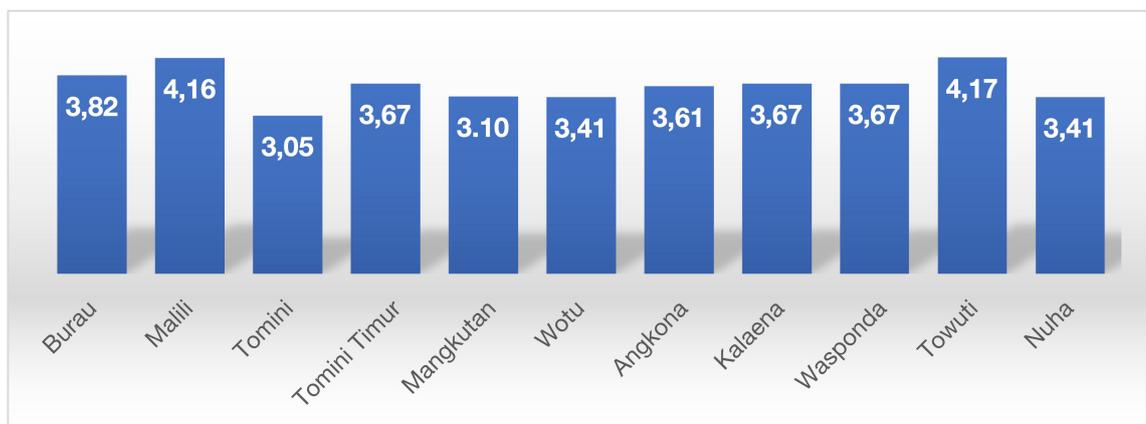
Sebaliknya, Kecamatan Burau memiliki skor terendah sebesar 1,95, menunjukkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap bencana alam dan/atau kejahatan. Kecamatan Malili (2,33) dan Angkona (2,54) juga mencatat skor rendah, menandakan perlunya peningkatan upaya mitigasi risiko bencana dan pengendalian kejahatan

di wilayah ini. Kecamatan lainnya, seperti Tomoni (2,82), Tomoni Timur (2,63), Mangkutana (3,10), dan Wotu (2,73), memiliki skor menengah, yang mencerminkan kebutuhan akan perhatian lebih lanjut, terutama dalam penguatan sistem keamanan dan infrastruktur mitigasi bencana.

Data ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan intervensi keamanan di kecamatan dengan skor rendah, seperti Burau dan Malili, melalui penguatan patroli keamanan, pembangunan infrastruktur tanggap bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan kualitas hidup masyarakat di seluruh Kabupaten Luwu Timur.

5. Dimensi Legalitas Dalam Sebaran Kecamatan

Gambar 4.13: Dimensi Legalitas Berdasarkan Sebaran Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Olah Data (2024)

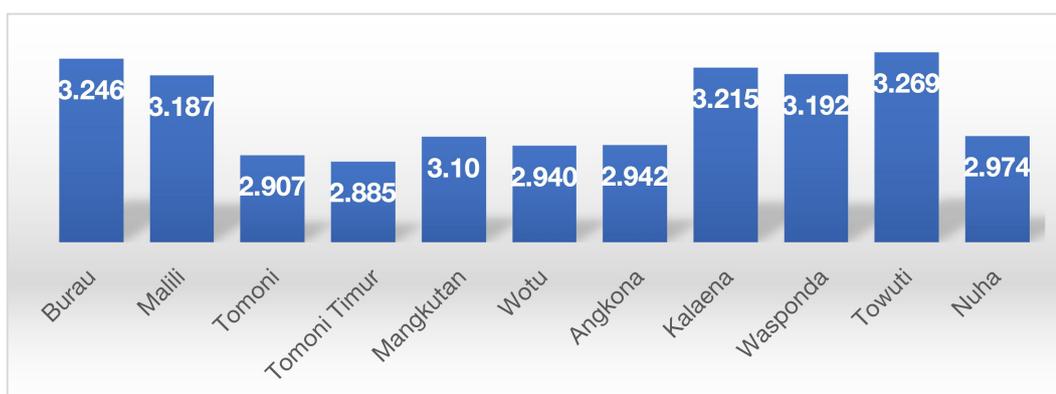
Berdasarkan Gambar 4.13, dimensi legalitas di Kabupaten Luwu Timur, yang diukur melalui indikator status kepemilikan tanah dan kesesuaian tata ruang, menunjukkan bahwa Kecamatan Towuti memiliki skor tertinggi sebesar 4,17, diikuti oleh Malili dengan skor 4,16. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua kecamatan tersebut memiliki pengelolaan legalitas yang baik, seperti kepemilikan tanah yang jelas dan kesesuaian tata ruang yang terjaga. Sebaliknya, Kecamatan Tomoni mencatat skor

terendah sebesar 3,05, menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan status kepemilikan tanah yang sah dan konsistensi dalam penerapan tata ruang. Kecamatan Wotu, Angkona, dan Nuha memiliki skor yang sama sebesar 3,41, menandakan adanya ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan legalitas di wilayah tersebut. Kecamatan lainnya, seperti Mangkutana (3,10), Kalaena (3,61), Wasponda (3,67), dan Tomoni Timur (3,67), menunjukkan skor menengah, yang mencerminkan bahwa meskipun legalitas cukup baik, masih diperlukan penguatan dalam penerapan kebijakan tata ruang dan penyelesaian konflik kepemilikan tanah.

Secara keseluruhan, kecamatan dengan skor rendah hingga menengah membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan legalitas yang lebih baik melalui program sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa lahan, dan pengawasan pelaksanaan tata ruang yang lebih ketat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan mencegah munculnya permukiman kumuh baru.

Berdasarkan hasil penelitian analisis dimensi pada sebaran kecamatan penanganan pemukiman dan perumahan kumuh di kabupaten Luwu Timur. Maka berikut ini adalah gambaran pemukiman dan perumahan kumuh berdasarkan reting kecamatan.

Gambar 4.14: pemukiman dan perumahan kumuh berdasarkan reting skor kecamatan di Kabupaten Luwu Timur



Sumber: Olah Data (2024)

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan gambaran kondisi pemukiman dan perumahan kumuh berdasarkan reting skor kecamatan di

Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan dengan skor tertinggi adalah Towuti, dengan nilai 3,26, diikuti oleh Burau dengan skor 3,24, dan Kalaena dengan skor 3,21. Sementara itu, Wasponda memiliki skor 3,19, sedikit lebih tinggi dari Malili yang mencatatkan skor 3,18. Kecamatan Tomoni Timur dan Tomoni memiliki skor yang berdekatan, masing-masing 2,88 dan 2,90. Kecamatan Nuha dan Mangkutana memiliki skor yang sama, yaitu 2,97. Adapun Wotu dan Angkona mencatatkan skor yang identik, yaitu 2,94. Data ini memberikan indikasi mengenai tingkat kerawanan atau potensi kekumuhan di berbagai kecamatan yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan data rerata skor per kecamatan terkait kondisi pemukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah di masing-masing kecamatan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat ditempuh:

1. Identifikasi Masalah Spesifik di Setiap Kecamatan

Pemerintah harus melakukan kajian mendalam untuk memahami penyebab kekumuhan di setiap kecamatan. Misalnya, di kecamatan dengan skor tinggi seperti Towuti, Burau, dan Kalaena, perlu dianalisis apakah masalahnya disebabkan oleh aksesibilitas infrastruktur, sanitasi, atau ketersediaan fasilitas dasar.

2. Penyediaan Infrastruktur Dasar

Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti saluran drainase, jalan yang layak, serta sistem pengolahan limbah untuk kecamatan dengan skor tinggi. Infrastruktur ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencegah potensi kekumuhan lebih lanjut.

3. Program Rehabilitasi dan Revitalisasi Pemukiman

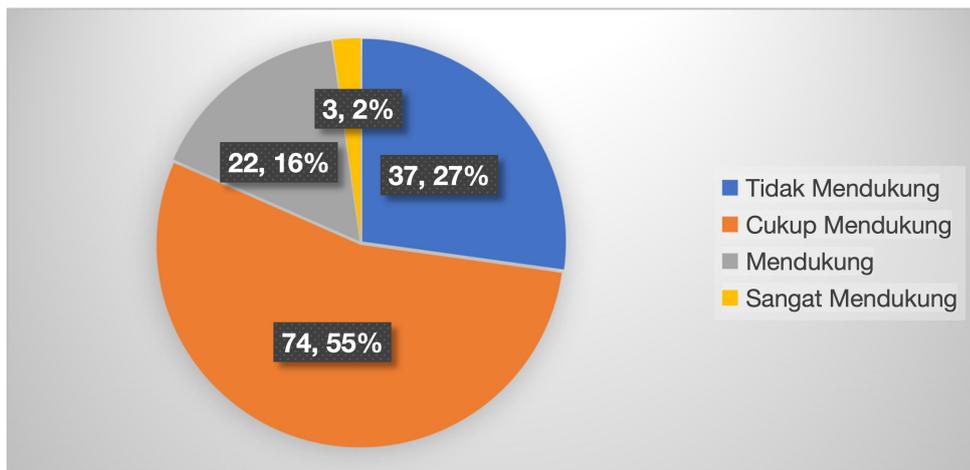
Kecamatan seperti Tomoni Timur dan Nuha, yang memiliki skor moderat, bisa diarahkan pada program rehabilitasi perumahan kumuh melalui bantuan perbaikan rumah, penyediaan air bersih, serta pengelolaan lingkungan yang ramah.

4. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, pelatihan pengelolaan sampah, serta inisiatif penghijauan lingkungan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, upaya penanganan kekumuhan dapat berjalan lebih efektif.
5. Penguatan Kebijakan Perkotaan dan Perencanaan Wilayah
Kebijakan tata ruang perlu diperkuat untuk mengatur pemanfaatan lahan secara optimal dan mencegah pertumbuhan pemukiman kumuh di masa depan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengembangan wilayah dilakukan secara terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Fokus pada Kecamatan dengan Skor Rendah hingga Sedang
Kecamatan seperti Wotu, Angkona, dan Tomoni Timur, dengan skor yang lebih rendah, harus tetap menjadi perhatian untuk mencegah peningkatan kekumuhan. Pendekatan preventif melalui program edukasi dan penyediaan fasilitas dasar perlu diterapkan.
7. Pengalokasian Anggaran Secara Proporsional
Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran secara proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan di setiap kecamatan. Kecamatan dengan skor tertinggi membutuhkan intervensi lebih besar dalam bentuk dana dan sumber daya.
8. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan donor internasional dalam program-program pemberdayaan dan pengentasan pemukiman kumuh.

E. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap faktor pendukung Penangan Permasalahan Perumahan Dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Luwu Timur

1. Persepsi masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah

Gambar 4.14: Persepsi masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah Kabupaten Luwu Timur



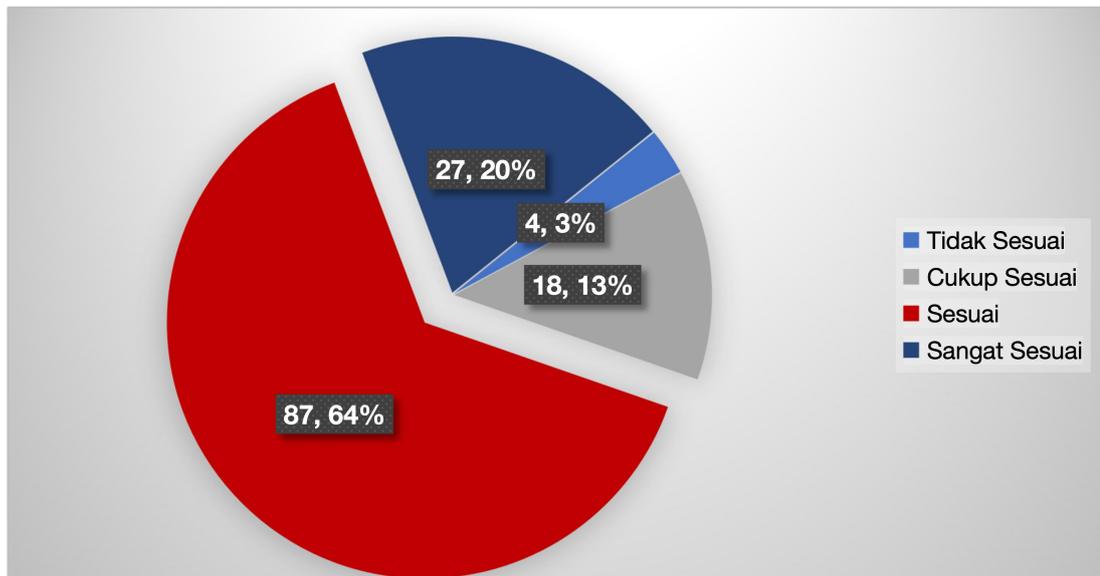
Sumber: Olah Data (2024)

Berdasarkan data persepsi masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah di Kabupaten Luwu Timur, mayoritas responden berada pada kategori "Cukup Mendukung" dengan persentase sebesar 54,4% atau sebanyak 74 responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pandangan yang cukup positif terhadap program tersebut. Sebaliknya, sebanyak 27,2% atau 37 responden menyatakan "Tidak Mendukung," mengindikasikan adanya kelompok masyarakat yang kurang puas atau tidak merasakan manfaat dari program bantuan sosial. Kategori "Mendukung" diisi oleh 16,2% atau 22 responden, menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang benar-benar mendukung implementasi program ini. Sementara itu, hanya 2,2% atau 3 responden yang berada dalam kategori "Sangat Mendukung," mencerminkan dukungan penuh dari segelintir individu.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat cukup mendukung program bantuan sosial, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kepercayaan dan dukungan penuh terhadap program tersebut. Pemerintah dapat menggunakan data ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial sehingga lebih banyak masyarakat merasakan manfaatnya.

2. Persepsi masyarakat terhadap program pemerintah dalam penanganan pemukiman dan perumahan kumuh

Gambar 4.15: Persepsi masyarakat terhadap program pemerintah dalam penanganan pemukiman dan perumahan kumuh Kabupaten Luwu Timur



Sumber: Olah Data (2024)

Berdasarkan data persepsi masyarakat terhadap program pemerintah dalam penanganan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, mayoritas responden, yaitu 64% atau sebanyak 87 orang, menyatakan bahwa program tersebut "Sesuai" dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat merasakan manfaat yang signifikan dari implementasi program pemerintah dalam penanganan masalah permukiman kumuh.

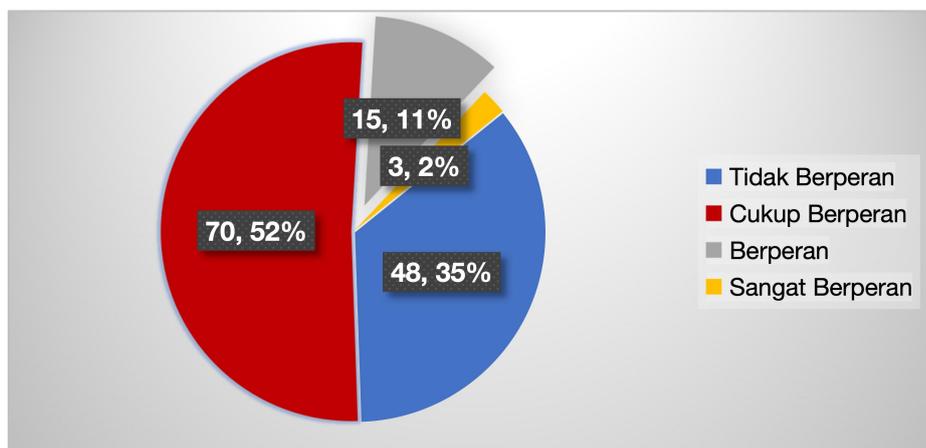
Sebanyak 19,9% atau 27 responden menyatakan program ini

"Sangat Sesuai," menunjukkan adanya dukungan penuh dan kepuasan tinggi terhadap efektivitas program tersebut. Di sisi lain, terdapat 13,2% atau 18 responden yang menilai program ini "Cukup Sesuai," mengindikasikan bahwa program ini masih memiliki ruang untuk peningkatan. Namun, hanya 2,9% atau 4 responden yang menyatakan bahwa program tersebut "Tidak Sesuai," yang menunjukkan adanya sebagian kecil masyarakat yang merasa program ini belum relevan dengan kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa program pemerintah dalam penanganan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur telah memberikan dampak positif yang signifikan, meskipun masih ada peluang untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat.

3. Persepsi masyarakat terhadap peran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Gambar 4.16: Persepsi masyarakat terhadap peran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kabupaten Luwu Timur



Sumber: Olah Data (2024)

Berdasarkan data persepsi masyarakat terhadap peran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Luwu Timur, mayoritas responden, yaitu 51,5% atau sebanyak 70 orang, menyatakan bahwa program ini "Cukup Berperan" dalam

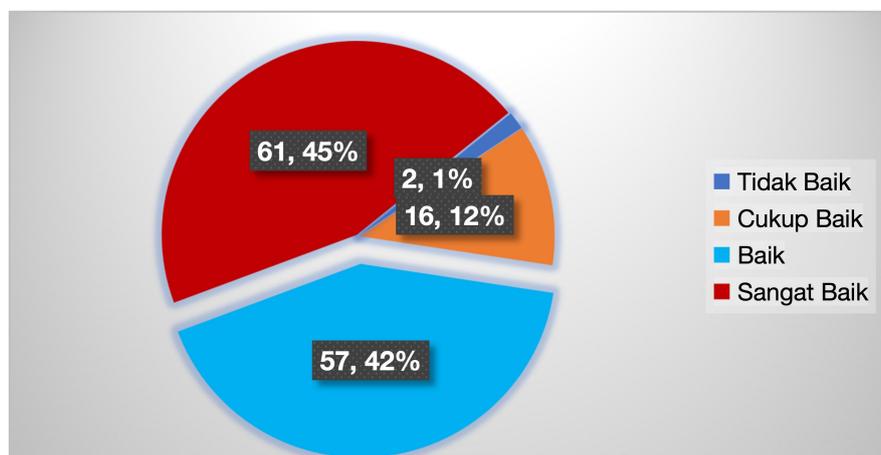
membantu kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa program BLT Dana Desa memberikan dampak yang cukup signifikan, meskipun tidak sepenuhnya optimal.

Sebanyak 35,3% atau 48 responden menilai bahwa program ini "Tidak Berperan," mengindikasikan adanya kelompok masyarakat yang merasa belum mendapatkan manfaat nyata dari bantuan tersebut. Sementara itu, 11% atau 15 responden menyatakan bahwa program ini "Berperan," dan hanya 2,2% atau 3 responden yang menilai program ini "Sangat Berperan," mencerminkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap manfaat yang dirasakan.

Secara keseluruhan, meskipun program BLT Dana Desa telah memberikan dampak positif bagi sebagian besar masyarakat, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan persepsi dan efektivitas program, terutama bagi kelompok masyarakat yang merasa tidak terbantu oleh program ini. Pemerintah desa dapat menggunakan data ini untuk mengevaluasi distribusi dan pelaksanaan program agar lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah

Gambar 4.17: Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Luwu Timur



Sumber: Olah Data (2024)

Berdasarkan data persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penanganan permukiman dan perumahan kumuh, mayoritas responden memiliki pandangan positif. Sebanyak 44,9% atau 61 responden menyatakan bahwa kinerja pemerintah "Sangat Baik," sementara 41,9% atau 57 responden menilai kinerja tersebut "Baik." Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa puas dengan upaya pemerintah dalam menangani masalah permukiman kumuh.

Sebaliknya, hanya 11,8% atau 16 responden yang menilai kinerja pemerintah "Cukup Baik," dan 1,5% atau 2 responden yang menilai "Tidak Baik." Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas masyarakat merasa kinerja pemerintah sudah optimal, masih ada sebagian kecil masyarakat yang melihat adanya ruang untuk perbaikan.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya menangani permukiman kumuh. Namun, pemerintah perlu terus meningkatkan program dan layanan agar dapat menjangkau seluruh masyarakat secara lebih merata dan efektif.

F. Rekomendasi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Dan Perumahan Kumuh Di Wilayah kabupaten Luwu Timur

Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu Timur merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara terpadu untuk menciptakan lingkungan yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan. Upaya ini membutuhkan perencanaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mengatasi akar permasalahan seperti akses infrastruktur, legalitas tanah, mitigasi

bencana, serta pengelolaan lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, sekaligus mencegah munculnya kawasan kumuh baru di masa depan.

1. Kondisi Fisik

Berdasarkan data kondisi fisik kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah, khususnya dinas terkait, untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman:

1. Peningkatan Kualitas Bangunan Rumah:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bangunan rumah di kawasan kumuh masih memerlukan perbaikan. Banyak rumah kemungkinan tidak memenuhi standar layak huni, baik dari segi struktur, ventilasi, maupun material bangunan.

- Pemerintah perlu mengadakan program renovasi rumah tidak layak huni dengan memberikan bantuan teknis maupun material kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sosialisasi tentang standar konstruksi bangunan yang aman dan sehat juga penting dilakukan.

2. Pengelolaan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki tingkat hunian yang terlalu padat, yang berpotensi menyebabkan masalah sosial dan lingkungan, seperti minimnya ruang gerak, tekanan pada infrastruktur, dan sanitasi yang buruk.

- Dinas terkait dapat menyusun kebijakan tata ruang yang lebih baik untuk mengatur distribusi penduduk, termasuk program relokasi bagi kawasan dengan tingkat kepadatan yang terlalu tinggi. Pembangunan permukiman baru yang terintegrasi dengan fasilitas umum juga perlu diperhatikan.

3. Peningkatan Akses Air Bersih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap air bersih. Namun, upaya perbaikan masih diperlukan untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani sepenuhnya.

- Perluasan Jaringan Distribusi Air: Memastikan jaringan distribusi air bersih menjangkau seluruh rumah di kawasan kumuh.
- Pembangunan Sumur Bor atau Instalasi Air Minum (SPAM): Mengembangkan sumber air bersih lokal, seperti sumur bor, untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.
- Peningkatan Kualitas Air: Memastikan air bersih yang tersedia memenuhi standar kualitas kesehatan. Perbaikan Fasilitas Sanitasi
- Pemerintah harus menyediakan fasilitas sanitasi yang layak, seperti pembangunan sistem pembuangan limbah rumah tangga yang lebih baik dan penyediaan toilet umum di kawasan kumuh. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi juga perlu ditingkatkan untuk mendorong perubahan perilaku.

4. Koordinasi Antar Instansi

Sanitasi di kawasan ini cukup memadai, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk memperbaiki sistem pembuangan limbah cair dan pengelolaan sanitasi agar lebih efektif dan ramah lingkungan.

- Dinas terkait harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, swasta, dan komunitas lokal, untuk merancang program penanganan yang holistik, seperti pengelolaan lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penataan kawasan permukiman.

2. Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan data penelitian, kondisi ekonomi masyarakat di kawasan permukiman kumuh masih berada pada tingkat rendah.

Pendapatan yang minim dapat menjadi penyebab utama rendahnya kualitas hidup dan akses terhadap kebutuhan dasar.

1. Pendapatan Masyarakat

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di kawasan permukiman kumuh masih berada pada tingkat rendah. Pendapatan yang minim dapat menjadi penyebab utama rendahnya kualitas hidup dan akses terhadap kebutuhan dasar.

- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan kerja berbasis potensi lokal, pemberian akses permodalan usaha mikro, dan pembukaan lapangan pekerjaan melalui investasi di sektor yang relevan.
- program penguatan koperasi berbasis komunitas dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan sedikit lebih baik dibandingkan indikator lain, masih terdapat tantangan yang signifikan. Hambatan dapat berupa kurangnya fasilitas, tenaga ahli, atau mahalnya biaya layanan.

- Pemerintah perlu memastikan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas kesehatan dan pendidikan di area ini. Selain itu, program layanan kesehatan keliling (mobile clinic) dan pendidikan berbasis komunitas seperti kelas gratis untuk anak-anak kurang mampu dapat menjadi solusi jangka pendek. Subsidi atau skema pembebasan biaya bagi kelompok rentan juga harus menjadi prioritas.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan tergolong rendah, yang menjadi tantangan besar dalam keberhasilan program revitalisasi kawasan kumuh. Partisipasi yang minim seringkali disebabkan oleh kurangnya

edukasi dan motivasi masyarakat dalam keterlibatan pembangunan.

- Pemerintah perlu mengembangkan program pelibatan masyarakat melalui sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja berbasis komunitas. Pemberian pelatihan tentang pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan juga sangat penting. Program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti penghijauan lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas, dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka.

3. Lingkungan

dimensi lingkungan di kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, berikut adalah rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten dan instansi terkait:

1. Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di kawasan permukiman kumuh masih tergolong kurang optimal. Masalah yang umum terjadi adalah kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) yang memadai, minimnya sistem pengangkutan sampah, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah.

- Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah: Pemerintah perlu menyediakan fasilitas TPS yang lebih memadai, termasuk sistem pengangkutan sampah yang terjadwal.
- Program Edukasi Lingkungan: Melaksanakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, seperti memilah sampah organik dan anorganik.
- Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas: Mendorong inisiatif masyarakat melalui program daur ulang dan bank

sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang tidak terkelola.

2. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman kumuh mendapat skor yang cukup baik, menunjukkan bahwa area ini memiliki ruang hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, potensi ini perlu dikelola lebih baik agar ruang hijau dapat memberikan manfaat maksimal.

- **Pemeliharaan dan Pengembangan Ruang Hijau:** Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk memelihara dan menambah ruang terbuka hijau di wilayah ini.
- **Peningkatan Fungsionalitas Ruang Hijau:** Memanfaatkan ruang hijau sebagai area rekreasi, olahraga, dan edukasi lingkungan untuk masyarakat setempat.
- **Kolaborasi dengan Komunitas:** Melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian ruang hijau melalui kegiatan penghijauan dan taman komunitas.

3. Kualitas Udara

Kualitas udara di kawasan ini mendapatkan skor yang relatif tinggi, menandakan bahwa lingkungan belum terlalu tercemar oleh polusi udara. Namun, tetap penting untuk menjaga agar kualitas ini tidak menurun di masa depan akibat peningkatan aktivitas manusia atau pengelolaan lingkungan yang buruk.

- **Pengendalian Emisi:** Mengawasi sumber emisi dari kendaraan bermotor atau aktivitas industri kecil di sekitar kawasan permukiman.
- **Program Penanaman Pohon:** Memperbanyak penanaman pohon di area yang masih minim vegetasi untuk menjaga kualitas udara.
- **Edukasi tentang Polusi Udara:** Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak polusi udara dan langkah-langkah untuk mencegahnya.

4. Pencemaran Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan permukiman kumuh masih menghadapi masalah pencemaran, baik dari limbah rumah tangga, limbah cair, maupun limbah lainnya yang tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada kualitas air, tanah, dan kesehatan masyarakat.

- Peningkatan Sistem Sanitasi: Memastikan ketersediaan sistem pengelolaan limbah cair yang memadai di kawasan ini untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
- Pengelolaan Limbah Rumah Tangga: Memberikan fasilitas dan sistem pengelolaan limbah rumah tangga yang efektif, termasuk pemisahan limbah berbahaya.
- Penerapan Regulasi Lingkungan: Mengawasi pelaksanaan regulasi lingkungan yang melarang pembuangan limbah sembarangan dan memberikan sanksi bagi pelanggar.

4. Keamanan

Dimensi keamanan di kawasan permukiman dan perumahan kumuh di Kabupaten Luwu Timur, berikut rekomendasi yang relevan untuk pemerintah dan instansi terkait:

1. Risiko Bencana Alam

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kawasan permukiman kumuh menghadapi risiko bencana alam yang cukup tinggi, seperti banjir, tanah longsor, atau bencana lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh lokasi yang tidak aman, buruknya sistem drainase, dan kurangnya infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana.

- Pemetaan Wilayah Rawan Bencana: Pemerintah perlu melakukan pemetaan daerah rawan bencana untuk mengidentifikasi kawasan yang paling rentan terhadap risiko bencana alam.
- Peningkatan Infrastruktur Mitigasi Bencana: Memperbaiki sistem drainase untuk mencegah banjir, membangun talud di

area rawan longsor, dan memastikan infrastruktur tahan bencana di kawasan permukiman.

- Program Edukasi dan Simulasi Bencana: Melaksanakan pelatihan dan simulasi mitigasi bencana kepada masyarakat agar mereka lebih siap menghadapi situasi darurat.
- Relokasi Penduduk di Area Rawan: Jika memungkinkan, pemerintah dapat memfasilitasi relokasi penduduk dari area berisiko tinggi ke kawasan yang lebih aman.

2. Tingkat Kejahatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kejahatan di kawasan permukiman kumuh cukup mengkhawatirkan, yang dapat mencakup pencurian, perkelahian, atau bentuk kriminalitas lainnya. Faktor-faktor seperti kurangnya keamanan lingkungan, pengangguran, dan lemahnya kontrol sosial dapat menjadi penyebab utama.

- Peningkatan Keamanan Lingkungan: Pemerintah dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk meningkatkan patroli keamanan di kawasan ini, terutama pada malam hari.
- Pembentukan Kelompok Keamanan Berbasis Komunitas: Mendorong masyarakat untuk membentuk sistem keamanan lingkungan, seperti Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan), untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan.
- Program Pemberdayaan Ekonomi: Mengurangi pengangguran melalui pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan dapat menurunkan tingkat kejahatan.
- Pemasangan CCTV dan Penerangan Jalan: Memasang kamera pengawas di titik-titik rawan kejahatan dan memperbaiki pencahayaan jalan untuk meningkatkan keamanan.

5. Legalitas

Dimensi legalitas di kawasan permukiman kumuh Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat legalitas kepemilikan tanah dan menyesuaikan tata ruang dengan aturan yang berlaku. Berikut adalah rekomendasi untuk pemerintah dan instansi terkait dalam menangani masalah legalitas di kawasan tersebut:

1. Status Kepemilikan Tanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di kawasan permukiman kumuh telah memiliki status kepemilikan tanah yang jelas. Namun, penting untuk memastikan bahwa status kepemilikan tersebut benar-benar legal dan terdaftar secara resmi untuk menghindari sengketa di masa mendatang.

- Program Legalitas Tanah Massal: Melaksanakan program sertifikasi tanah bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen kepemilikan resmi.
- Edukasi tentang Hak Tanah: Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen resmi kepemilikan tanah serta proses pengurusannya.
- Penyelesaian Sengketa Tanah: Membentuk tim mediasi khusus untuk menyelesaikan potensi sengketa kepemilikan tanah di kawasan kumuh.

2. Kesesuaian Tata Ruang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata ruang di kawasan permukiman kumuh belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya pembangunan yang tidak mengikuti rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau berada di zona yang tidak diperuntukkan untuk permukiman.

- Penyesuaian dan Penataan Tata Ruang: Pemerintah perlu meninjau ulang RTRW dan melakukan penyesuaian jika memungkinkan untuk mengakomodasi kawasan permukiman kumuh secara legal.

- Relokasi Penduduk: Untuk kawasan yang berada di zona tidak sesuai tata ruang (misalnya di bantaran sungai atau zona hijau), pemerintah dapat merelokasi penduduk ke area yang lebih aman dan sesuai.
- Pengawasan Pembangunan: Memperketat pengawasan terhadap pembangunan baru di kawasan kumuh untuk memastikan kesesuaiannya dengan perencanaan tata ruang.
- Revitalisasi Kawasan: Melaksanakan program revitalisasi kawasan untuk mengubah area permukiman kumuh menjadi permukiman yang lebih teratur dan sesuai dengan tata ruang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis terhadap kondisi pemukiman dan perumahan di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan adanya variasi tingkat kekumuhan di setiap kecamatan. Kecamatan dengan skor tertinggi seperti Towuti, Burau, dan Kalaena memerlukan perhatian lebih intensif, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan, dan perencanaan tata ruang. Di sisi lain, kecamatan dengan skor sedang seperti Wotu, Angkona, dan Tomoni Timur membutuhkan langkah preventif agar tidak terjadi peningkatan kekumuhan.

Faktor-faktor utama yang menyebabkan kekumuhan meliputi kondisi fisik (bangunan rumah dan sanitasi), lingkungan (pengelolaan sampah dan pencemaran), sosial ekonomi (pendapatan rendah dan akses layanan dasar), keamanan (risiko bencana dan tingkat kejahatan), serta legalitas (status kepemilikan tanah dan tata ruang). Dimensi lingkungan dan fisik menjadi fokus utama karena skor rata-ratanya masih menunjukkan kondisi yang membutuhkan perbaikan signifikan.

B. Saran

1. Penyediaan Infrastruktur Dasar

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti saluran drainase, sistem pengolahan limbah, jalan lingkungan, dan penyediaan air bersih untuk kecamatan dengan tingkat kekumuhan tinggi.

2. Program Rehabilitasi Perumahan

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kecamatan dengan skor kekumuhan sedang hingga tinggi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas perumahan dan mengurangi tingkat kekumuhan.

3. Penguatan Kebijakan Tata Ruang

Penyusunan dan penegakan kebijakan tata ruang perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.

4. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Melibatkan masyarakat melalui program edukasi mengenai pengelolaan lingkungan, sanitasi, dan penghijauan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.

5. Kolaborasi Multi-Pihak

Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan CSR untuk mendukung pengentasan kawasan kumuh melalui pendanaan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur.

6. Mitigasi Risiko Bencana dan Keamanan

Perlu adanya peningkatan upaya mitigasi risiko bencana dan pengendalian tingkat kejahatan melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana serta pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan.

7. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh untuk memastikan efektivitas dan efisiensi intervensi yang dilakukan.

8. Perlu kajian lebih mendalam terkait permasalahan yang berbeda-beda pada setiap lokus penelitian terutama pada kawasan permukiman kumuh dengan tingkat skoring tertinggi. Ketersediaan fasilitas fisik maupun non fisik untuk peningkatan kualitas lingkungan dan taraf hidup (perekonomian) masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

REKOMENDASI PENELITIAN
KAJIAN PENANGANAN PERMASALAHAN KUMUH KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	INDIAKTOR	PROGRAM	INSTANSI TERKAIT
1	Kondisi Fisik Bangunan Hunian	1. Penyusunan Rencana Kontijensi Desa yang memuat tentang proses identifikasi dan penyusunan rencana langkah efektif antara lain klinik rumah layak huni, pendidikan dan pelatihan rumah tahan gempa (mitigasi bencana)	1. Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Pemereintah Desa 5. LSM
		2. Sosialisasi tentang standar konstruksi bangunan yang aman dan sehat	1. Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman 2. Pemerintah Desa
2	Sosial Ekonomi	1. Pendidikan dan Pelatihan Wirausaha yang berbasis potensi Lokal	1. Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian 2. Konsultan UMKM 3. Perguruan Tinggi
		2. Pemberian akses permodalan usaha mikro bagi masyarakat desa	1. Dinas Sosial 2. Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian 3. CSR 4. Lembaga Keuangan
		3. Penguatan koperasi berbasis komunitas dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat	1. Dinas Sosial 2. Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian

NO	INDIAKTOR	PROGRAM	INSTANSI TERKAIT
		4. Optimalisasi BUMDES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian 3. Pemerintah Desa
3	Lingkungan	1. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, seperti memilah sampah organik dan anorganik untuk di daur ulang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman 2. Dinas Lingkungan Hidup 2. Pemerintah Desa
		3. Pengadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) disetiap lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman 2. Pemerintah Desa
4	Legalitas Atau Kepemilikan	1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen resmi kepemilikan tanah serta proses pengurusannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman 2. Badan Pertanahan 3. Pemerintah Desa
		2. Sertifikasi tanah bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen kepemilikan resmi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman 2. Badan Pertanahan 3. Pemerintah Desa
		3. Sosialisasi kepada masyarakat pada kawasan yang berada di zona tidak sesuai dengan tata ruang kawasan pemukiman (misalnya di bantaran sungai atau zona hijau)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman 2. Pemerintah Desa

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fathor Rasyid (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori metode dan Praktek, Kediri: IAIN Kediri Press
- Freddy Rangkuti (2006). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, 14th edition, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sadyohutomo. (2008). Manajemen Kota dan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafrida Hafni Sahir (2022). Metodologi Penelitian, Bojonegoro: KBm Indonesia

Artikel

- Araujo et al. 2023. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta. Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Pemukiman Vol 5, Nomor 2, 155-169. Di akses 23 juni 2024 di <https://jurnal.uns.ac.id/jdk/article/view/73074/41815>.
- Averal, S, R. Zah, C. Tavares-Correa. 2008. Linking Socioeconomic Classes and Land Cover Data in Lima, Peru: Assessment Through the Application of Remote Sensing and GIS. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 11: 27–37.
- Charls J Stokes, A Theory of Slums, Land Economics, Vol. 38, No. 3 (Aug., 1962), pp. 187-197, <https://doi.org/10.2307/3144581>
- Krisandriyana, M. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta (Universitas Sebelas Maret). Universitas Sebelas Maret. Diakses dari: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/71329/MzYzNDk2/Faktor-yangMempengaruhi-Keberadaan-Kawasan-Permukiman-Kumuh-di-Surakarta-HALAMAN.pdf>

Suparlan, P. 2000. Segi Sosial dan Ekonomi Pemukiman Kumuh
www.kimpraswil.go.id.

Silvia Yolanda dan Charitas Fibriani (2019). Analisis Tingkat Permukiman Kumuh Menggunakan Metode AHP Berbasis SIG pada Kota Magelang, Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi. Vol. 5. No1.
<https://teknosi.fti.unand.ac.id/index.php/teknosi/article/view/1018/pdf>

Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188) sebagaimana yang telah di ubah dengan undang undang No 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Menteri Tentang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018, Tentang pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785).

Surat keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 169 / D-06 / IV / 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di wilayah Kabupaten Luwu Timur

Internet

Desa Balantang Luwu Timur, Infografis Penduduk Desa Balantang, (2024), Diakses pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 13.23.
<https://balantang.digitaldesa.id/infografis/penduduk>

Desa Wewangriu Luwu Timur, Statistik semua Penduduk Desa Wewangriu, Diakses

pada tanggal 24 Juni 2024, Pukul 13.25.
https://wewangriu.desa.id/statistik/semua_penduduk

Desa Baruga Luwu Timur, Statistik Penduduk desa Baruga, Diakses pada tanggal 24 Juni 2024, Pukul 13.26. <https://baruga.desa.id/tentang-2/statistik>

Desa Lakawali Luwu Timur, Statisttik Semua Pendudku Desa Lakawali, Diakses pada tanggal 24 Juni 2024, Pukul 13.27.
https://lakawali.desa.id/statistik/semua_penduduk

Burau Pantai Luwu Timur, Kampung Burau Pantai, Diakses pada tanggal 24 Juni 2024, Pukul 13.28.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/7849/burau-pantai>

L.M Mashudi, Detik Sulsel, Ekonomi Luwu Timur Tumbuh Pesat di 2023 tapi pengangguran meningkat, Diakses pada tanggal 24 Juni 2024, Pukul 13.29. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7399502/ekonomi-luwu-timur-tumbuh-pesat-di-2023-tapi-pengangguran-meningkat>

BPS, Jumlah Penduduk menurut kabupaten kota, Diakses pada tanggal 24 Juni 2024, Pukul 13.31. <https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>

Muh Alief, Rakyat Sulsel Fajar, Kabupaten Luwu Timur dalam angka statistik, Diakses pada tanggal 24 Juni 2024, Pukul 13.35.
<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/03/20/kabupaten-luwu-timur-dalam-angka-statistik-kunci-2020-2022/>

Admin DPU, RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh), Rencana Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/375/rp2kpkpk-rencana-pencegahan-dan-peningkatan-kualitas-perumahan-kumuh-dan-permukiman-kumuh>



KUESIONER PENELITIAN

PENANGANAN PERMASALAHAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

Penelitian ini terlaksana atas Kerjasama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) bersama dengan Yayasan Lentera Inspirasi Indonesia

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

No HP :

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Usia Responden : <20 Tahun 21-30 Tahun 31-40 Tahun
41-50 Tahun > 50 Tahun

Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah SD/Sedaraj SMP/Sedaraj
SMA/Sedaraj Sarjana

Pekerjaan : Tidak Bekerja Pekerja Lepas Pekerja Tetap
Wirasuasta Lainnya

Pendapatan Perbulan : Tidak Berpendapatan <Rp500.000 Rp.500.000-1.000.000
> Rp. 1.000.000

Jumlah KK dalam Rumah : 1 2 3

Jumlah Tanggungan : 1 - 3 4-6 >6

Keterangan Opsi

- 1 : Sangat Tidak Sesuai
- 2 : Tidak Sesuai
- 3 : Cukup Sesuai
- 4 : Sesuai
- 5 : Sangat Sesuai

No	PERNYATAAN	SKOR				
Indikator Fisik						
a.1	Bagaimana kondisi rumah tempat tinggal (layak huni)	1	2	3	4	5
a.2	Bahan kondisi bangunan yang digunakan pada rumah Anda	1	2	3	4	5
a.3	Bagaimana kondisi atap, dinding dan lantai rumah Anda	1	2	3	4	5
b.1	Kondisi hunian yang sangat padat hingga kurangnya ruang per orang (overcrowding).	1	2	3	4	5
c.1	ketersediaan air bersih di rumah	1	2	3	4	5
c.2	Jarak ke sumber air bersih	1	2	3	4	5
c.3	Kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari	1	2	3	4	5
d.1	Fasilitas sanitasi/toilet di rumah Anda	1	2	3	4	5
d.2	Bagaimana kondisi sistem drainase di lingkungan untuk pencegahan banjir	1	2	3	4	5
d.3	Bagaimana kondisi jalan di lingkungan tempat tinggal Anda	1	2	3	4	5
Indikator Sosial Ekonomi						
a.1	Anggota keluarga Anda yang mengalami kesulitan akses terhadap pendidikan	1	2	3	4	5
a.2	Penghasilan kepala keluarga dapat menutupi kebutuhan rumah tangga	1	2	3	4	5
b.1	Fasilitas kesehatan yang dapat diakses dengan mudah dari lingkungan Anda seperti puskesmas atau klinik	1	2	3	4	5
c.1	Masyarakat di lingkungan Anda berpartisipasi dalam program penanganan permukiman kumuh	1	2	3	4	5
Indikator Lingkungan						
a.1	Sistem pengumpulan dan pengelolaan sampah yang memadai.	1	2	3	4	5
a.2	Frekuensi penumpukan sampah di area permukiman	1	2	3	4	5
b.1	Tersedia ruang terbuka hijau di sekitar lingkungan Anda	1	2	3	4	5
c.1	Bagaimana kualitas udara di lingkungan Anda	1	2	3	4	5
d.1	sering terjadi penyakit menular di lingkungan Anda (misalnya demam berdarah, diare)	1	2	3	4	5
Indikator Keamanan						
a.1	Kawasan tempat tinggal Anda rawan terhadap bencana lain (misalnya longsor, kebakaran)	1	2	3	4	5
a.2	Pogram pemerintah atau masyarakat yang membantu mitigasi risiko bencana di daerah Anda	1	2	3	4	5
b.1	Sering terjadi tindak kejahatan di lingkungan Anda	1	2	3	4	5
b.2	Apakah kendaraan umum bisa diakses dengan mudah dari rumah	1	2	3	4	5
Indikator Legalitas						
a.1	Memiliki sertifikat atau bukti legal kepemilikan lahan/rumah	1	2	3	4	5
a.2	Rumah Anda berada di area yang legal atau memiliki izin dari pemerintah	1	2	3	4	5
b.1	Perencanaan tata ruang yang jelas untuk wilayah tempat tinggal	1	2	3	4	5
Pernyataan Tambahan						
1	Program Bantuan Sosial Pemerintah seperti BLT, Raskin, PKH, Beasiswa Pendidikan dan lainnya	1	2	3	4	5
2	Program pemerintah untuk penanganan permukiman dan perumahan kumuh di wilayah Anda	1	2	3	4	5
3	Bagaiaman peran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap penanganan permukiman dan perumahan kumuh di daerah anda	1	2	3	4	5
4	Bagaimana Anda menilai kinerja pemerintah dalam penanganan permukiman dan perumahan kumuh di daerah Anda	1	2	3	4	5

IDENTITAS RESPONDEN

NO.	RESPONDEN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	PENDAPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH TANGGUNGAN
1	BR1	2	3	2	1	1	2	2
2	BR2	2	4	4	2	3	1	2
3	BR3	2	5	3	2	3	1	2
4	BR4	2	3	3	2	3	1	1
5	BR5	2	3	4	2	3	1	1
6	BR6	2	2	4	2	3	2	1
7	BR7	1	4	3	1	1	1	1
8	BR8	1	3	2	1	1	1	1
9	BR9	2	3	3	2	3	1	2
10	BR10	2	4	3	2	3	1	2
11	BR11	2	3	2	2	2	1	1
12	BR12	2	3	5	3	4	1	4
13	BR13	2	5	4	2	3	1	3
14	BR14	2	4	2	1	1	1	2
15	BR15	2	3	3	2	2	1	1
16	BR16	2	4	2	3	1	2	2
17	BR17	2	4	2	2	3	1	2
18	BR18	2	5	2	1	1	1	1
19	BR19	2	3	3	2	2	1	2
20	BR20	2	5	4	2	2	1	2
21	ML1	1	5	1	2	2	1	2
22	ML2	2	3	3	3	4	1	3
23	ML3	2	5	2	2	2	1	2
24	ML4	2	4	3	4	2	1	3
25	ML5	1	5	2	2	1	1	1
26	ML6	2	4	3	3	2	1	3
27	ML7	2	5	3	2	2	2	3
28	ML8	1	4	2	2	2	1	1
29	ML9	1	3	3	1	1	2	2
30	ML10	2	3	3	1	3	1	2
31	ML11	2	2	4	4	4	2	1
32	ML12	2	5	4	4	2	1	1
33	ML13	1	4	2	1	1	1	2
34	ML14	2	3	3	2	4	1	2
35	ML15	1	5	2	1	1	1	1
36	ML16	2	4	2	2	2	1	2
37	ML17	1	2	4	1	1	3	2
38	ML18	1	3	2	1	1	1	2
39	ML19	1	2	2	1	1	1	2
40	ML20	2	3	2	2	2	1	2
41	ML21	1	4	3	1	1	1	2
42	ML22	1	4	2	2	2	1	2

NO.	RESPONDEN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	PENDAPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH TANGGUNGAN
43	ML23	2	3	4	4	3	1	2
44	ML24	2	3	1	2	2	1	3
45	ML25	2	2	2	2	2	1	1
46	ML26	2	4	2	2	3	1	3
47	ML27	2	4	2	2	2	1	2
48	ML28	1	2	2	1	2	1	2
49	ML29	2	3	3	2	2	1	2
50	ML30	2	4	3	4	2	1	2
51	TM1	1	5	1	5	4	3	2
52	TM2	2	5	3	5	4	3	1
53	TM3	2	4	3	2	3	2	2
54	TM4	2	3	4	3	5	1	1
55	TM5	2	3	2	2	3	1	1
56	TM6	2	5	2	2	3	3	3
57	TM7	2	3	4	2	3	2	2
58	TT1	2	4	3	2	3	3	3
59	TT2	1	3	4	2	3	2	3
60	MK1	1	2	3	5	5	1	2
61	MK2	1	5	4	2	3	3	3
62	MK3	1	3	4	4	5	1	1
63	MK4	2	3	4	3	5	1	1
64	WT1	2	4	4	2	3	3	2
65	WT2	2	5	4	2	5	2	1
66	WT3	1	3	4	3	5	3	2
67	WT4	2	4	4	3	5	2	2
68	WT5	2	4	2	2	2	2	2
69	WT6	2	5	3	2	3	3	3
70	WT7	1	3	2	2	5	3	2
71	WT8	2	3	3	3	3	2	1
72	WT9	2	4	2	2	3	3	2
73	WT10	1	2	4	1	1	1	1
74	WT11	2	4	4	3	5	2	1
75	WT12	1	3	4	2	3	1	1
76	WT13	2	4	3	2	3	1	1
77	WT14	1	4	4	4	4	1	2
78	WT15	1	3	4	2	3	1	1
79	WT16	2	4	4	3	4	2	2
80	WT17	2	3	3	2	3	3	2
81	WT18	1	5	2	1	1	2	3
82	WT19	1	3	4	2	3	1	2
83	WT20	1	2	4	2	3	1	1
84	WT21	2	5	2	2	3	3	3
85	WT22	2	4	4	2	3	2	2

NO.	RESPONDEN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	PENDAPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH TANGGUNGAN
86	WT23	2	3	3	2	3	1	2
87	WT24	2	4	2	2	3	2	2
88	WT25	2	4	4	3	4	2	2
89	WT26	1	3	4	3	4	1	1
90	WT27	1	3	3	2	3	2	2
91	WT28	1	3	4	2	3	1	1
92	WT29	2	4	2	2	3	3	3
93	WT30	1	3	3	2	3	2	2
94	WT31	2	5	4	3	4	2	2
95	WT32	2	4	3	3	4	2	2
96	WT33	2	4	4	3	4	1	1
97	WT34	2	5	2	2	3	3	3
98	WT35	2	3	4	3	4	2	2
99	WT36	2	4	4	2	3	2	3
100	WT37	2	4	4	2	3	2	1
101	WT38	1	4	4	3	4	1	2
102	WT39	2	4	3	2	3	2	2
103	WT40	2	4	4	2	3	1	1
104	WT41	2	4	4	5	4	2	2
105	AK1	2	5	2	2	4	1	1
106	AK2	2	5	4	2	4	1	1
107	AK3	1	5	2	2	3	1	1
108	AK4	2	4	1	2	3	1	1
109	AK5	2	5	3	2	3	1	1
110	AK6	2	4	4	2	4	1	1
111	KL1	2	2	4	2	4	1	1
112	KL2	2	3	4	4	4	1	1
113	KL3	2	5	2	2	3	1	2
114	KL4	1	5	2	2	3	1	1
115	KL5	2	3	4	2	3	1	1
116	WS1	1	2	4	2	3	3	2
117	TW1	2	2	4	2	3	2	2
118	TW2	1	1	4	2	2	3	4
119	NH1	1	3	3	3	4	1	1
120	NH2	2	3	4	3	4	2	2
121	NH3	2	3	4	2	3	1	2
122	NH4	2	4	2	2	4	2	2
123	NH5	2	4	4	2	3	1	2
124	NH6	2	5	2	2	4	3	3
125	NH7	2	4	4	3	4	2	2
126	NH8	2	4	2	2	3	2	2
127	NH9	2	4	4	2	4	3	3
128	NH10	2	3	4	3	4	1	1

NO.	RESPONDEN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	PENDAPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH TANGGUNGAN
129	NH11	2	5	4	5	4	1	2
130	NH12	2	3	4	3	4	2	2
131	NH13	2	3	2	2	3	3	3
132	NH14	2	4	3	2	3	3	2
133	NH15	2	4	2	5	3	3	3
134	NH16	2	4	1	2	3	3	2
135	NH17	2	3	4	3	4	2	2
136	NH18	2	2	3	2	4	1	1

NO.	RESPOND EN	INDIKATOR FISIK										SOSIAL EKONOMI				LINGKUNGAN					KEAMANAN				LEGALITAS			TAMBAHAN				
		A1	A2	A3	B1	C1	C2	C3	D1	D2	D3	A1	A2	B1	C1	A1	A2	B1	C1	C2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	1	2	3	4	5
1	BR1	3	3	2	4	4	4	5	5	4	5	3	4	3	2	5	4	5	5	3	2	2	1	5	5	5	2	2	1	1	2	3
2	BR2	4	3	3	1	5	5	5	5	1	2	2	4	2	1	3	3	5	5	2	2	1	1	2	5	5	1	2	1	1	2	3
3	BR3	3	3	3	1	5	5	5	5	3	4	1	5	1	1	3	3	5	5	3	1	1	1	3	5	5	1	2	1	1	2	3
4	BR4	4	3	2	1	5	5	5	5	3	3	2	5	3	1	3	3	5	5	3	3	3	1	3	5	5	1	2	1	1	2	3
5	BR5	4	3	3	1	5	5	5	3	3	3	1	3	2	1	3	3	5	5	3	2	1	1	2	5	5	1	2	1	1	2	3
6	BR6	4	3	3	1	5	5	5	5	2	3	1	3	1	1	5	5	5	5	3	1	1	1	5	5	5	5	2	1	1	2	3
7	BR7	3	3	3	1	5	5	5	3	3	3	2	3	4	1	5	5	5	5	3	2	1	1	3	5	5	1	2	1	1	2	3
8	BR8	4	3	3	1	5	5	5	5	3	5	3	3	3	1	3	3	5	5	3	1	1	1	4	5	5	1	2	1	1	2	3
9	BR9	4	4	4	1	5	5	5	5	4	5	4	4	5	1	3	3	5	5	3	1	1	1	5	5	5	1	2	1	1	2	3
10	BR10	3	3	3	1	5	5	5	5	3	4	3	3	4	1	5	5	5	5	3	3	2	1	5	5	5	1	3	1	1	3	3
11	BR11	4	3	3	2	5	5	5	5	1	3	3	3	2	1	4	4	5	5	3	1	1	1	5	5	5	3	2	1	1	2	3
12	BR12	3	3	3	2	5	5	5	5	3	4	3	5	3	1	3	3	5	5	3	1	1	1	5	5	5	1	2	1	1	2	5
13	BR13	4	3	3	2	5	5	5	4	2	3	3	3	2	1	2	2	4	4	3	3	2	1	3	5	5	3	2	1	1	2	3
14	BR14	3	3	3	1	5	5	5	4	1	3	3	3	2	1	4	4	5	5	3	2	1	1	3	5	5	1	2	1	1	2	3
15	BR15	3	3	3	1	5	5	4	5	4	3	1	3	1	1	3	3	5	5	3	1	1	1	3	5	5	1	2	1	1	2	3
16	BR16	3	3	3	2	5	5	5	5	1	3	1	3	2	1	3	3	5	5	2	2	1	1	1	5	5	1	2	1	1	2	3
17	BR17	4	4	3	2	5	5	5	5	1	3	3	3	4	1	5	5	5	5	3	2	2	1	3	5	5	1	2	1	1	2	3
18	BR18	2	2	2	1	5	5	5	5	1	5	1	3	1	1	3	3	5	5	3	1	1	1	5	5	5	1	2	1	1	2	2
19	BR19	4	4	4	1	5	5	5	5	1	2	4	3	1	1	3	3	5	5	2	1	1	1	5	5	5	1	2	1	1	2	3
20	BR20	4	3	3	1	5	5	5	5	1	5	1	4	1	1	3	3	3	5	3	3	1	1	5	5	5	1	2	1	1	2	3
21	ML1	1	3	3	3	2	2	3	4	4	4	5	5	5	3	5	4	4	5	5	5	1	1	5	5	5	3	1	1	1	1	2
22	ML2	4	2	2	3	5	5	5	3	2	3	5	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	4	4	4	2	3	4	1	1	
23	ML3	3	3	2	2	5	5	3	3	2	2	2	2	4	2	5	3	5	5	3	2	1	1	1	5	5	3	1	1	1	1	1
24	ML4	3	3	4	1	5	5	5	5	3	3	2	3	2	2	4	3	4	4	5	4	2	1	1	5	5	3	2	2	2	1	4
25	ML5	3	3	3	2	5	5	5	5	3	4	3	2	3	3	4	4	4	5	5	4	3	1	3	5	5	3	1	1	1	1	2
26	ML6	4	3	3	5	3	2	3	5	3	4	5	3	1	3	5	5	5	5	5	4	2	1	2	5	5	3	2	3	3	1	3
27	ML7	3	3	3	3	5	5	5	3	2	2	5	3	1	3	4	4	5	5	4	3	1	1	1	5	5	3	1	1	1	1	1
28	ML8	3	3	3	1	4	5	3	3	2	3	1	3	1	1	5	4	5	5	3	1	1	1	2	5	5	3	4	3	3	4	3
29	ML9	2	2	2	5	3	3	4	3	1	3	4	3	1	2	2	3	5	5	3	3	2	2	3	5	5	3	2	2	2	3	3
30	ML10	3	3	3	1	4	1	1	1	3	3	3	2	3	3	3	3	5	5	4	1	1	4	1	5	5	3	1	2	1	1	1
31	ML11	3	3	3	1	4	4	4	3	1	3	3	3	3	2	2	3	5	5	3	3	4	2	3	5	5	3	2	2	2	3	3
32	ML12	4	3	4	1	3	3	3	1	3	4	1	4	1	3	2	2	5	5	3	3	3	1	5	5	5	3	2	1	1	1	2
33	ML13	3	3	3	2	3	2	4	4	2	4	4	3	2	2	2	2	5	5	3	3	3	2	5	1	1	1	1	2	2	1	3
34	ML14	2	2	2	2	1	1	1	2	2	5	5	3	5	3	4	2	5	5	1	1	3	1	2	5	2	3	2	2	2	5	5
35	ML15	2	2	2	1	5	5	4	4	3	2	1	1	1	3	3	3	5	5	4	2	3	1	2	5	5	4	2	2	1	1	1
36	ML16	3	3	3	2	4	4	4	3	2	3	3	3	2	3	3	3	5	5	3	3	1	1	5	5	5	2	2	2	1	2	2
37	ML17	4	4	4	1	4	4	4	5	3	4	3	2	1	3	2	2	5	5	3	3	2	1	5	5	5	2	3	1	1	2	2
38	ML18	2	3	2	4	4	5	4	3	2	3	4	3	4	2	2	2	5	5	3	3	2	2	3	5	5	2	3	2	1	3	3
39	ML19	3	3	3	2	4	4	4	5	1	2	4	3	1	2	3	3	5	5	3	3	3	1	3	5	5	3	2	2	2	1	2
40	ML20	4	4	4	2	4	4	4	5	3	4	3	3	2	2	3	3	5	5	3	3	2	1	3	5	5	3	2	1	1	2	2
41	ML21	2	2	3	4	4	3	4	3	1	2	4	2	2	2	1	1	4	4	5	3	1	2	2	5	5	2	3	1	1	3	2
42	ML22	3	2	3	3	4	3	4	3	2	2	2	3	3	2	2	2	5	5	4	4	2	1	2	5	5	2	2	1	1	2	2
43	ML23	3	3	2	3	4	4	4	3	2	3	4	3	2	2	2	2	4	5	2	3	2	1	2	5	5	4	3	2	2	3	2

NO.	RESPOND EN	INDIKATOR FISIK											SOSIAL EKONOMI				LINGKUNGAN					KEAMANAN				LEGALITAS			TAMBAHAN					
		A1	A2	A3	B1	C1	C2	C3	D1	D2	D3	A1	A2	B1	C1	A1	A2	B1	C1	C2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	1	2	3	4	5		
44	ML24	3	3	2	4	4	3	4	3	2	3	2	3	2	2	4	4	3	2	2	1	2	5	5	3	4	3	3	4	4				
45	ML25	2	2	2	3	5	4	4	3	2	2	4	3	2	3	5	5	3	3	3	2	2	5	5	4	4	3	2	4	4				
46	ML26	2	2	2	2	4	4	4	2	2	3	5	2	1	3	2	2	5	5	4	4	2	2	3	5	5	2	5	2	2	5	4		
47	ML27	3	3	2	3	3	3	4	3	2	1	5	2	5	3	2	2	5	5	4	4	3	2	1	5	5	3	4	3	2	3	4		
48	ML28	2	2	2	4	3	2	4	3	2	3	4	3	2	3	2	2	5	5	2	3	2	2	3	5	5	4	3	1	1	3	2		
49	ML29	2	2	3	3	5	5	5	5	4	4	2	3	4	1	5	5	5	5	3	3	2	1	3	5	5	3	3	2	1	3	3		
50	ML30	4	4	4	2	5	5	5	5	2	3	2	3	2	1	5	5	5	5	3	2	2	1	3	5	5	3	2	1	1	2	3		
51	TM1	2	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3		
52	TM2	3	3	3	4	2	2	2	3	1	3	3	2	3	3	2	3	4	3	5	5	5	3	4	5	1	3	3	3	2	2	2	2	
53	TM3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	
54	TM4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
55	TM5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	
56	TM6	3	2	3	3	3	4	5	4	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
57	TM7	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	1	2	2	2	
58	TT1	2	3	4	2	4	4	3	3	3	3	2	4	4	3	2	3	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	3	2	3	2	2	2	
59	TT2	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	
60	MK1	3	3	3	2	5	5	5	5	3	2	4	4	4	3	3	4	5	5	2	1	1	1	5	4	4	4	1	1	2	2	2	2	
61	MK2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	2	2	2	3	4	3	3	3	2	2	2	2	3	
62	MK3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
63	MK4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	
64	WT1	2	3	4	2	4	4	4	3	3	3	2	4	4	2	2	3	4	4	2	2	2	4	4	5	5	3	3	2	3	2	2	2	
65	WT2	2	3	3	2	3	4	4	4	4	4	2	3	4	2	4	4	4	4	2	2	4	2	4	4	4	3	4	2	3	4	3	3	
66	WT3	2	2	3	2	2	2	2	2	4	4	2	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	4	2	2	2	2	2	
67	WT4	2	3	2	3	4	4	4	2	2	3	3	3	3	2	2	2	4	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	
68	WT5	3	3	3	4	2	2	2	3	1	3	3	2	3	3	2	3	4	4	5	5	5	3	4	5	1	3	3	3	2	2	2	2	
69	WT6	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	4	3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	2	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	
70	WT7	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	
71	WT8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	4	4	4	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	
72	WT9	4	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
73	WT10	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	4	3	3	4	3	2	2	2	2	
74	WT11	2	3	4	2	4	4	3	3	3	3	2	4	2	2	2	3	4	4	2	2	2	4	4	5	5	5	4	2	2	2	2	2	
75	WT12	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
76	WT13	2	3	3	2	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	3	4	4	4	2	3	4	3	4	3
77	WT14	2	3	3	2	3	4	4	4	4	4	2	4	4	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	5	4	3	3	2	3	3	3	3	3
78	WT15	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	3
79	WT16	2	3	4	2	4	3	3	3	3	3	2	4	4	2	2	3	4	4	2	2	2	4	4	3	4	5	4	2	2	2	2	2	2
80	WT17	2	3	3	2	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
81	WT18	2	2	3	2	2	2	2	2	4	4	2	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	3	3	4	2	2	2	2	2	2
82	WT19	2	2	3	2	2	2	2	2	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
83	WT20	2	3	2	3	4	4	4	2	2	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
84	WT21	2	3	2	3	4	4	4	2	3	2	3	2	3	3	3	4	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
85	WT22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	2	3	2	2	2	2
86	WT23	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3

NO.	RESPOND EN	INDIKATOR FISIK										SOSIAL EKONOMI				LINGKUNGAN					KEAMANAN				LEGALITAS			TAMBAHAN						
		A1	A2	A3	B1	C1	C2	C3	D1	D2	D3	A1	A2	B1	C1	A1	A2	B1	C1	C2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	1	2	3	4	5		
87	WT24	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
88	WT25	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	4	4	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
89	WT26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
90	WT27	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	
91	WT28	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	
92	WT29	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3	2	
93	WT30	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	2	2	2	2	2	
94	WT31	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	2	2	2	2	3	
95	WT32	2	3	4	2	4	4	4	3	3	3	2	3	3	2	2	3	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
96	WT33	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	
97	WT34	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4	3	3	2	2	2	3	
98	WT35	2	3	4	2	4	4	3	3	3	3	2	4	4	2	2	3	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	
99	WT36	2	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	
100	WT37	2	3	2	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	2	3	3	4	4	4	3	2	3	2	2	3	
101	WT38	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	4	3	3	2	2	4	3	4	3	3	2	2	2	3	
102	WT39	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	
103	WT40	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	2	4	4	2	2	2	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	3	2	2	2	2	
104	WT41	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	
105	AK1	2	2	2	3	3	4	4	2	2	4	4	3	3	2	2	3	3	4	4	3	2	4	3	1	3	3	1	2	3	4	3	3	
106	AK2	3	3	3	3	2	4	2	2	4	4	3	4	3	4	2	3	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	2	3	3	4	3	3	
107	AK3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	2	2	4	4	4	2	3	4	4	4	3	
108	AK4	3	3	3	3	1	3	2	1	1	2	3	3	3	4	2	3	4	4	2	2	3	2	2	4	4	4	2	4	4	4	4	3	
109	AK5	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	4	2	3	4	4	2	2	3	2	2	4	4	4	3	4	4	4	4	3	
110	AK6	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	1	2	4	4	3	2	3	2	3	2	4	4	3	4	4	3	3	3	
111	KL1	3	2	2	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	1	4	4	4	4	2	
112	KL2	2	2	2	3	4	4	4	2	1	1	4	4	3	4	2	3	3	4	4	2	2	4	3	4	4	4	2	2	3	4	3	3	
113	KL3	3	3	3	3	4	4	4	2	2	2	4	2	4	4	2	3	4	4	2	1	1	1	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
114	KL4	3	3	2	3	3	3	3	3	1	4	3	3	4	3	1	3	4	4	2	2	4	1	4	2	4	3	3	3	3	3	3	2	
115	KL5	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	1	3	4	4	2	2	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
116	WS1	2	2	3	3	4	4	4	4	1	4	3	3	4	4	5	5	5	3	3	5	5	2	5	5	3	3	4	3	3	3	4		
117	TW1	3	3	3	4	4	5	5	4	2	3	3	3	3	4	2	2	3	4	2	2	2	2	5	4	4	3	3	3	2	4	3	3	
118	TW2	3	3	3	3	2	1	1	2	4	3	3	2	3	3	4	3	5	5	3	5	3	3	5	5	5	4	1	2	2	2	2	2	
119	NH1	4	4	4	2	3	3	3	3	5	5	3	3	4	3	4	4	5	5	2	2	3	1	5	5	1	3	3	3	3	3	3	2	
120	NH2	3	3	3	3	4	4	4	4	2	3	1	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	
121	NH3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	3	3	2	2	2	1	3	2	2	2	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	
122	NH4	3	3	3	3	3	2	2	4	1	5	3	3	2	1	3	2	5	5	3	1	3	1	5	5	1	3	3	1	1	3	3	3	
123	NH5	4	4	4	3	5	1	3	3	3	4	4	2	3	1	3	3	1	1	1	3	3	1	4	5	1	5	3	1	2	3	3	3	
124	NH6	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	2	3	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	4	4	4	2	3	2	2	2	2	2	
125	NH7	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	4	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3	3	2	2	3	2	2	
126	NH8	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	2	3	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4	4	4	2	3	2	2	2	2	2	
127	NH9	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	4	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	
128	NH10	3	3	3	3	4	4	4	4	2	3	2	4	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	
129	NH11	5	5	5	5	3	3	3	3	1	1	4	3	3	1	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	1	4	5	1	3	5	3	3	

NO.	RESPOND EN	INDIKATOR FISIK										SOSIAL EKONOMI				LINGKUNGAN					KEAMANAN				LEGALITAS			TAMBAHAN				
		A1	A2	A3	B1	C1	C2	C3	D1	D2	D3	A1	A2	B1	C1	A1	A2	B1	C1	C2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	1	2	3	4	5
130	NH12	3	3	3	3	4	4	4	4	2	3	2	4	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	2	3	3
131	NH13	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	3	3	2	2	2	1	3	2	2	2	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3
132	NH14	5	5	5	3	3	3	3	3	2	5	4	3	3	3	4	3	5	5	3	1	1	3	5	5	1	3	3	3	3	3	
133	NH15	3	3	3	1	3	1	3	3	5	5	5	2	1	1	5	5	5	3	4	4	3	4	5	5	1	5	5	4	3	3	
134	NH16	3	3	3	3	3	3	5	2	1	5	5	3	1	1	5	5	5	5	1	3	3	1	5	5	1	3	3	3	3	3	
135	NH17	2	2	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	2	2	4	3	3	2	2	2	2	3	4	4	3	3	2	2	2	
136	NH18	2	2	2	2	3	3	3	3	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2	3	4	4	3	2	2	2	2	2

DOKUMENTASI

